



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**2024**

# LAPORAN KINERJA

**PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN**



**LAPORAN KINERJA (LKj)  
PUSAT DIKLAT SDM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2024**

---

## KATA PENGANTAR

---

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK selama Tahun 2024, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat perencanaan kinerja, serta memuat analisis pencapaian kinerja kegiatan yang telah dicapai oleh Pusat Diklat SDM LHK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberi informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung jalannya organisasi secara efektif dan efisien, baik di unit pusat maupun di unit daerah dan menjadi bagian dalam mewujudkan pencapaian peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sesuai tujuan penyusunannya.

Bogor, **14** Januari 2025

Kepala Pusat,



Dr.Ir.Kusdamayanti , M.Si  
NIP. 196708151992032002

---

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

---

### Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

---

---

**P**usat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) merupakan unit kerja/perangkat organisasi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan P2SDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*Sebagai instansi pemerintah, Pusat Diklat SDM LHK memiliki kewajiban untuk memberikan pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK selama Tahun 2024.*

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.208/DIK/PU/WAS.0/9/2020.

Renstra dilakukan penyempurnaan melalui Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3/DIK/TU/REN.0/1/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 208/DIK/PU/WAS.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Selanjutnya ditetapkan rencana kinerja dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM LHK yang dituangkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.307/DIK/TU/REN.0/12/2023.

Terakhir, berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor 466 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor : SK.307/DIK/TU/REN.0/12/2023 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Revisi rencana kinerja tersebut kemudian ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebagai kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang terukur.



Pusat Diklat SDM LHK pada tahun 2024 telah menetapkan 2 (dua) kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Selain itu terdapat Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM.

Indikator Kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK yaitu : 1) Lulusan Diklat Aparatur LHK, 2) Lulusan Diklat Non Aparatur LHK, 3) Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha, 4) Lulusan Pendidikan Karyasiswa, 5) Nilai KHDTK yang dikelola. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan dari Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan adalah Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten yang Kompeten dan Bersertifikat.

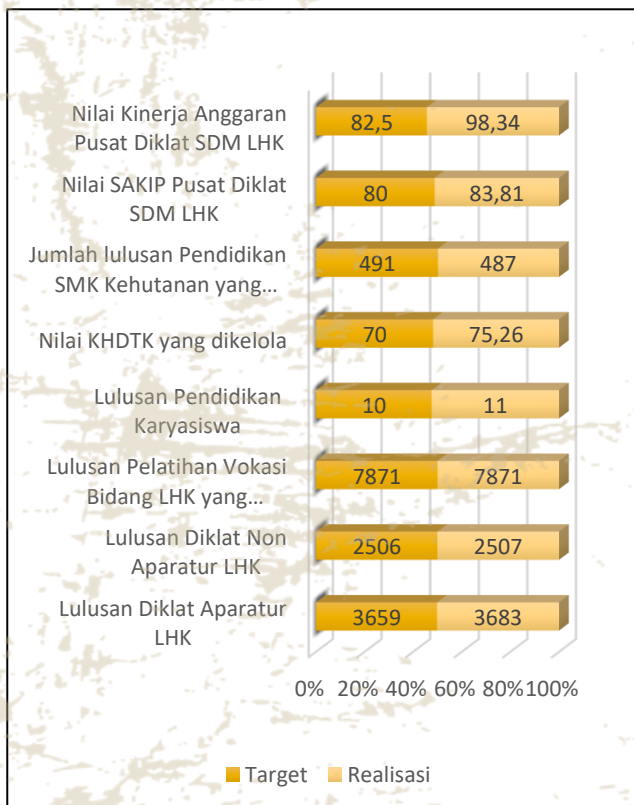
Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM yaitu 1) Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK, dan 2) Nilai Kerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 pada indikator kinerja kegiatan Lulusan Diklat Aparatur LHK sebesar 3.683 orang dari target 3.659 orang (100,66%). Capaian kinerja Lulusan Diklat Non Aparatur LHK sebesar 2.507 orang dari target sebesar 2.506 orang (100,04%), Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha sebesar 7.871 orang dari target 7.871 orang (100%). Capaian kinerja pada Lulusan Pendidikan Karyasiswa adalah 11 orang dari target 10 orang (110%), Nilai KHDTK yang dikelola adalah 75,26 poin dari target 70 poin (107,51%). Capaian kinerja untuk Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat sebanyak 487 orang dari target 491 orang (99,19%). Presentase capaian rata – rata dari 6 (enam) indikator kinerja kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 sebesar 102,90%.

Untuk Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK dapat dilihat dari hasil Penilaian Mandiri SAKIP yang telah dilaksanakan awal Tahun 2024 sebesar 83,81 poin dari target sebesar 80 poin (104,76%).

Nilai Kerja Anggaran (NKA) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 adalah sebesar 98,34 poin dari target sebesar 82,5 poin sehingga persentase capaian kinerja untuk NKA adalah 119,20%.

Grafik pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Pengukuran Capaian IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

Penggunaan anggaran tahun 2024 diperoleh realisasi keuangan Pusat Diklat SDM LHK sebesar Rp. 40.001.148.672,- atau sebesar **96,35%** dari target yang direncanakan sebesar Rp. 41.517.369.000,-.

Berdasarkan hasil pengukuran persentase capaian kinerja kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024, realisasi fisik kegiatan telah sesuai dan bahkan telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dari hasil pengukuran capaian persentase realisasi anggaran dan persentase realisasi capaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK tahun 2024 diperoleh efisiensi capaian kinerja rata – rata adalah 0,94. Efisiensi capaian kinerja tertinggi (nilai semakin < 1 maka semakin efisien) dapat dilihat dari IKK Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat dengan nilai efisiensi yaitu 0,64. Sedangkan untuk efisiensi capaian kinerja terendah terlihat pada IKK Lulusan Diklat Aparatur LHK dengan nilai efisiensi yaitu 0,99. Secara keseluruhan dari 6 (enam) IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 efisiensi capaian kinerja termasuk efisien.

Untuk efektivitas capaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK diperoleh rata – rata sebesar 1,01 (efektif). Hal ini dikarenakan presentase capaian kinerja tahun 2024 sama bahkan lebih tinggi dibanding tahun 2023. IKK yang mendapatkan penilaian efektif terdapat pada IKK Lulusan Diklat Aparatur (1,01), Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha (1,00) dan Lulusan Pendidikan Karyasiswa (1,10). Pada IKK Lulusan Diklat Non Aparatur LHK dan Nilai KHDTK yang dikelola, efektivitas capaian kinerja bernilai 1,00 namun karena persentase capaian kinerja tahun 2023 lebih besar dari tahun 2024 sehingga dikategorikan tidak efektif. Untuk jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat memang dikategorikan tidak efektif karena terdapat siswa yang tidak lulus pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024 yang merupakan tahun pamungkas dari Rencana Strategis Pusat Diklat SDM LHK, diperoleh progress akhir Renstra tahun 2020 – 2024 sebesar 87,75%, yang mana berdasarkan progress Renstra terdapat 3 (tiga) capaian kinerja yaitu lulusan diklat aparatur LHK, nilai KHDTK yang dikelola, dan jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, capaian kinerja yang diperoleh telah melebihi target renstra yang diharapkan.

Faktor pendukung dari keberhasilan pencapaian kinerja yang melebihi target renstra tahun 2020-2024 pada lulusan diklat aparatur LHK karena adanya mekanisme intervensi pelatihan kerjasama yang dilakukan pada satker lingkup BP2SDM pada tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 selain adanya pengembangan pelatihan metode MOOC. Pada IKK nilai KHDTK yang dikelola, keberhasilan pencapaian tidak terlepas dari telah tersusunnya Kriteria dan Indikator Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.6/P2SDM/SET.11/DIK.0/ 12/2022. Setiap Balai Pelatihan LHK dapat melakukan *self assessment* untuk mengukur kesesuaian efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan menggunakan kriteria dan indikator pengelolaan yang telah ditetapkan sehingga nilai KHDTK yang dikelola bisa lebih dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas penilaian yang diberikan oleh Tim Asesmen KHDTK Kehutanan. Pada jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat secara umum dikarenakan bertambahnya minat para lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMK Kehutanan Negeri lingkup KLHK sehingga PPDB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama renstra tahun 2020-2024.

Kendala pada capaian kinerja IKK yang tidak tercapai pada renstra tahun 2020-2024 yaitu Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (99,02%), Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha (30,73%) disebabkan penetapan target pada saat penyusunan Renstra yang telah mengakomodir pelaksanaan program kartu prakerja melalui IKK Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha dengan target sebanyak 35.000 orang. Pada pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kartu prakerja dimana KLHK tidak termasuk di dalamnya sehingga dukungan anggaran tidak dapat teralokasikan sebagaimana mestinya. Terakhir, Capaian kinerja pada IKK Lulusan Pendidikan Karyasiswa (39,11%) tidak tercapai disebabkan karena tidak didukung dengan ketersediaan anggaran yang diperlukan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Inovasi dan pengembangan yang dilakukan oleh Pusat Diklat SDM LHK pada tahun 2024 yaitu adanya penambahan kurikulum baru untuk pelatihan metode MOOC juga telah disusun Panduan Pelatihan Metode MOOC yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam berbagai pelatihan metode MOOC yang lain pada satker lingkup BP2SDM. Selain itu pada tahun 2024, Pusat Diklat SDM LHK telah menginisiasi pembentukan 5 (lima) KHDTK Diklat Kehutanan baru yaitu Hutan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan di Aceh, Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Negeri Malang, Hutan Pendidikan Universitas Mataram, dan Hutan Pendidikan dan Latihan Tuwanwouwi di Papua Barat.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Sumber Daya Manusia .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024 .....	6
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024.....	9
C. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Reviu Terhadap Dokumen Perencanaan.....	14
B. Reviu Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Badan P2SDM Tahun 2024.....	17
C. Metode Pengukuran.....	19
D. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	25
E. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
F. Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV PENUTUP.....	609
LAMPIRAN.....	62



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai Negeri Sipil Negeri (PNS) berdasarkan Golongan per Desember 2024 .....	5
Tabel 2. Matriks Renstra (Revisi) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024 .....	8
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024.....	11
Tabel 4. Revisi Perjanjian Kinerja (awal) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 .....	12
Tabel 5. Revisi Perjanjian Kinerja (akhir) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024.....	13
Tabel 6. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024.....	15
Tabel 7. Perubahan Target IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024.....	17
Tabel 8. Tindak Lanjut Hasil Reviu Penilaian Mandiri SAKIP dari BP2SDM Tahun 2024 .....	18
Tabel 9. Realisasi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 .....	21
Tabel 10. Pengukuran Efektivitas Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 .....	21
Tabel 11. Efisiensi Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 .....	22
Tabel 12. Progress Renstra Pusat Diklat SDM LHK sampai dengan Tahun 2024 .....	23
Tabel 13. Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur .....	25
Tabel 14. Pelatihan SDM Aparatur LHK di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 .....	30
Tabel 15. Realisasi Pelatihan SDM Aparatur LHK di Balai Pelatihan LHK Tahun 2024 .....	33
Tabel 16. Pelatihan SDM Non Aparatur LHK di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 .....	34
Tabel 17. Realisasi Pelatihan SDM Non Aparatur LHK di Balai Pelatihan LHK Tahun 2024 .....	38
Tabel 18. Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 .....	40
Tabel 19. Realisasi Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha di Balai Pelatihan LHK Tahun 2024 .....	41
Tabel 20. Kriteria dan Indikator Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan .....	45
Tabel 21. Hasil Indeks Nilai Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan Lingkup Badan P2SDM Tahun 2024 .....	46
Tabel 22. Sebaran Lulusan SMK Kehutanan Negeri berdasarkan Paket Kompetensi Keahlian Tahun 2024 .....	51
Tabel 23. Pelaksanaan Capaian Anggaran Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Grafik Pengukuran Capaian IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024.....iv
Gambar 2.	Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK.....3
Gambar 3.	Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2024..... 4
Gambar 4.	Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan per Desember 2024..... 4
Gambar 5.	Data Pegawai berdasarkan Jabatan per Desember 2024..... 5
Gambar 6.	Cascading Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024..... 7
Gambar 7.	Pohon Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024..... 8
Gambar 8.	Pelaksanaan <i>Benchmarking</i> ke BPSDM Provinsi Jawa Timur..... 25
Gambar 9.	Pelaksanaan Webinar ASN Belajar Seri Tahun 2024 yang dilaksanakan BPSDM Provinsi Jawa Timur.....29
Gambar 10.	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan Pelatihan Kehutanan Tahun 2024.....43
Gambar 11.	Pelaksanaan Presentasi Hasil Studi Karyasiswa Program Doktor (S3) Tahun 2024.....49
Gambar 12.	Grafik Pengukuran NKPA, IKPA dan NKA Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021-2024.....55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024.....	62
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Pengejawantahan dari Undang – undang tersebut diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melakukan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja.

Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor P. 53 Tahun 2014 mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengaturan tersebut mengamanatkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi oleh karena itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berkekuatan hukum (*legitimate*) yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dilaksanakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut telah diakomodir dan dilakukan penyesuaian melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja organisasi KLHK dalam menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan KLHK termasuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM).

Sebagai salah satu unit kerja dari BP2SDM yang memiliki tugas untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Diklat SDM LHK menetapkan kegiatan yang mempunyai indikator kinerja kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang dimaksud. Peningkatan kapasitas SDM LHK, efektivitas pengelolaan KHTDK Hutan Diklat, dan ketersediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat menjadi sasaran kegiatan dari Pusat Diklat SDM LHK yang harus dicapai.

Keberhasilan pencapaian kegiatan Pusat Diklat SDM LHK dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik aparatur dan non aparatur akan meningkatkan SDM Kehutanan menjadi lebih kompeten, berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dalam RPJMN 2020-2024, bahwa pengembangan kapasitas SDM merupakan salah satu Prioritas Nasional (PN) yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Sumberdaya manusia (SDM) merupakan faktor sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia yang masih menjadi isu utama khususnya dalam peningkatan pendidikan manusia Indonesia secara utuh dan nyata. Hal ini pula masih menjadi *critical issue* dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang sedianya dibutuhkan namun belum terlalu dipentingkan.

Pencapaian Pusat Diklat SDM LHK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dipertanggungjawabkan dengan menyusun Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penentuan kebijakan pada bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih baik dan sesuai pada waktu yang akan datang.

## **B. Tugas dan Fungsi**

### **a. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk-II/ 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Pusat Diklat SDM LHK mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, kerjasama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;

4. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengakuan lembaga pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan serta pengakuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan;
5. Bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pembinaan teknis pengelolaan sarana prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan pusat.

### **C. Sumber Daya Manusia**

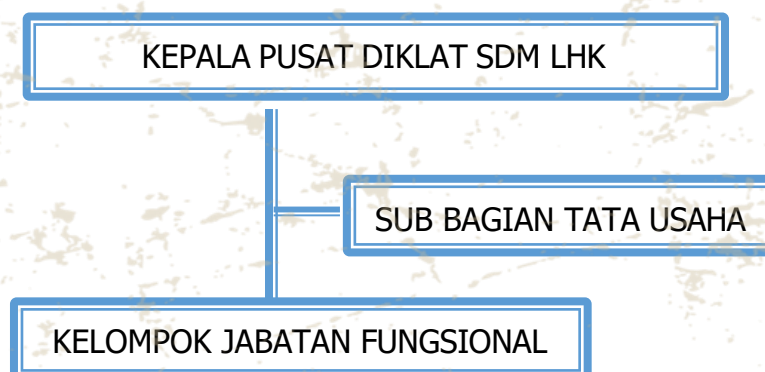
Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, struktur organisasi Pusat Diklat SDM LHK terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha didalamnya terdapat 5 tim kerja sesuai yaitu Tim Kerja Anggaran, Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja Kepegawaian, Tim Kerja BMN dan Kerumahtanggaan, Tim Kerja Persuratan, Kearsipan, Data dan Informasi.

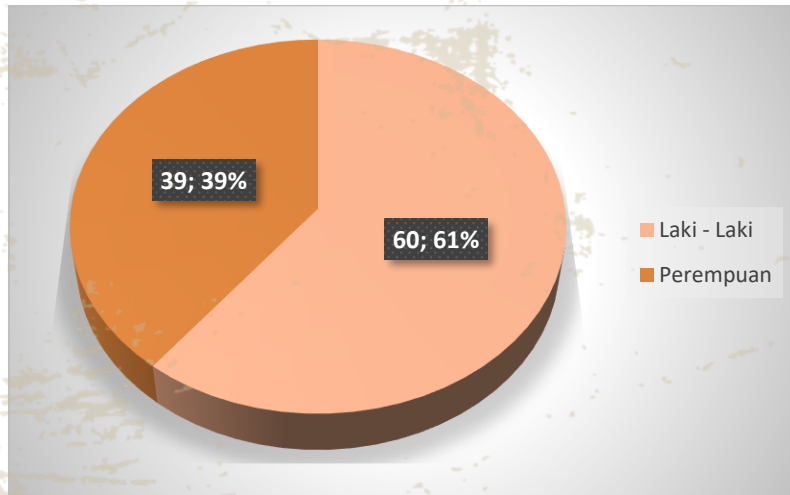
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Diklat SDM LHK membagi habis kelompok jabatan fungsional menjadi beberapa tim kerja, yaitu Tim Kerja Pelatihan Fungsional, Tim Kerja Pelatihan Teknis Aparatur dan Non Aparatur, Tim Kerja Pelatihan Kepemimpinan dan Administrasi, Tim Kerja Pendidikan Tinggi (Karyasiswa), Tim Kerja Pendidikan Menengah, Tim Kerja Perencanaan Pelatihan, Tim Kerja Pengembangan Pelatihan, serta Tim Kerja Penjaminan Mutu, Akreditasi dan Evaluasi.

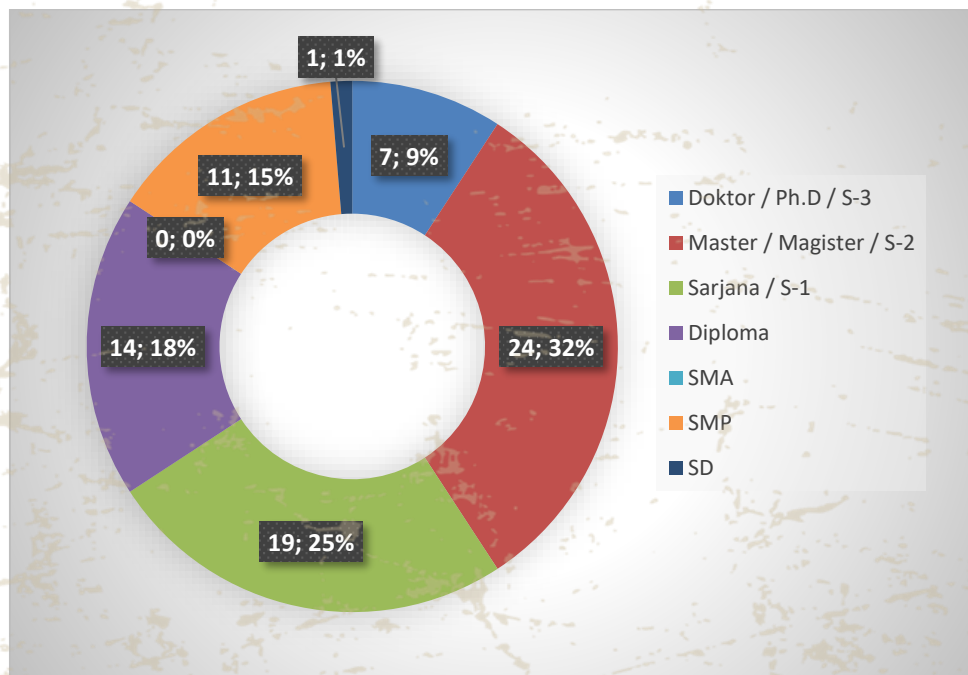


Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK

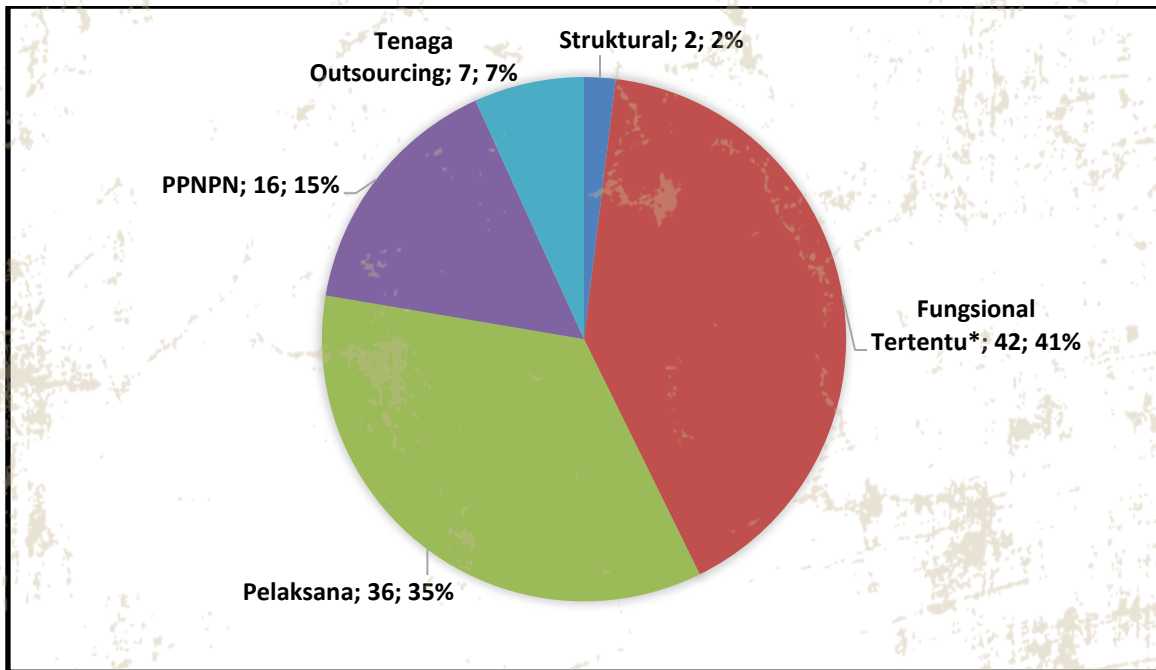
Jumlah pegawai Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 pada bulan Desember 2024 adalah 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Berikut ini jumlah pegawai di Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan serta golongan jabatan (sumber data: Tim Kerja Kepegawaian).



Gambar 3.  
Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2024



Gambar 4.  
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan Per Desember 2024



\*) Widyaiswara: 21 orang, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP):3 orang, Analis Pengelola Keuangan APBN: 2 orang, Analis Anggaran: 1 orang, Analis SDM Aparatur: 1 orang, Pranata Komputer: 3 orang, Arsiparis: 6 orang, Statistisi: 1 orang, Perencana: 2 orang, Ahli Pranata Humas: 1 orang, Terampil Asisten Perpustakaan: 1 orang.

Gambar 5.  
Data Pegawai berdasarkan Jabatan Per Desember 2024

Tabel 1. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Golongan per Desember 2024

Instansi	Golongan												Jumlah (Orang)	
	IV					III				II				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c		d
Pusat Diklat SDM LHK	7	1	7	3	3	7	11	7	11	1	-	5	-	63
Jumlah	21					36				6			63	

Sumber data : Tim Kerja Kepegawaian



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024**

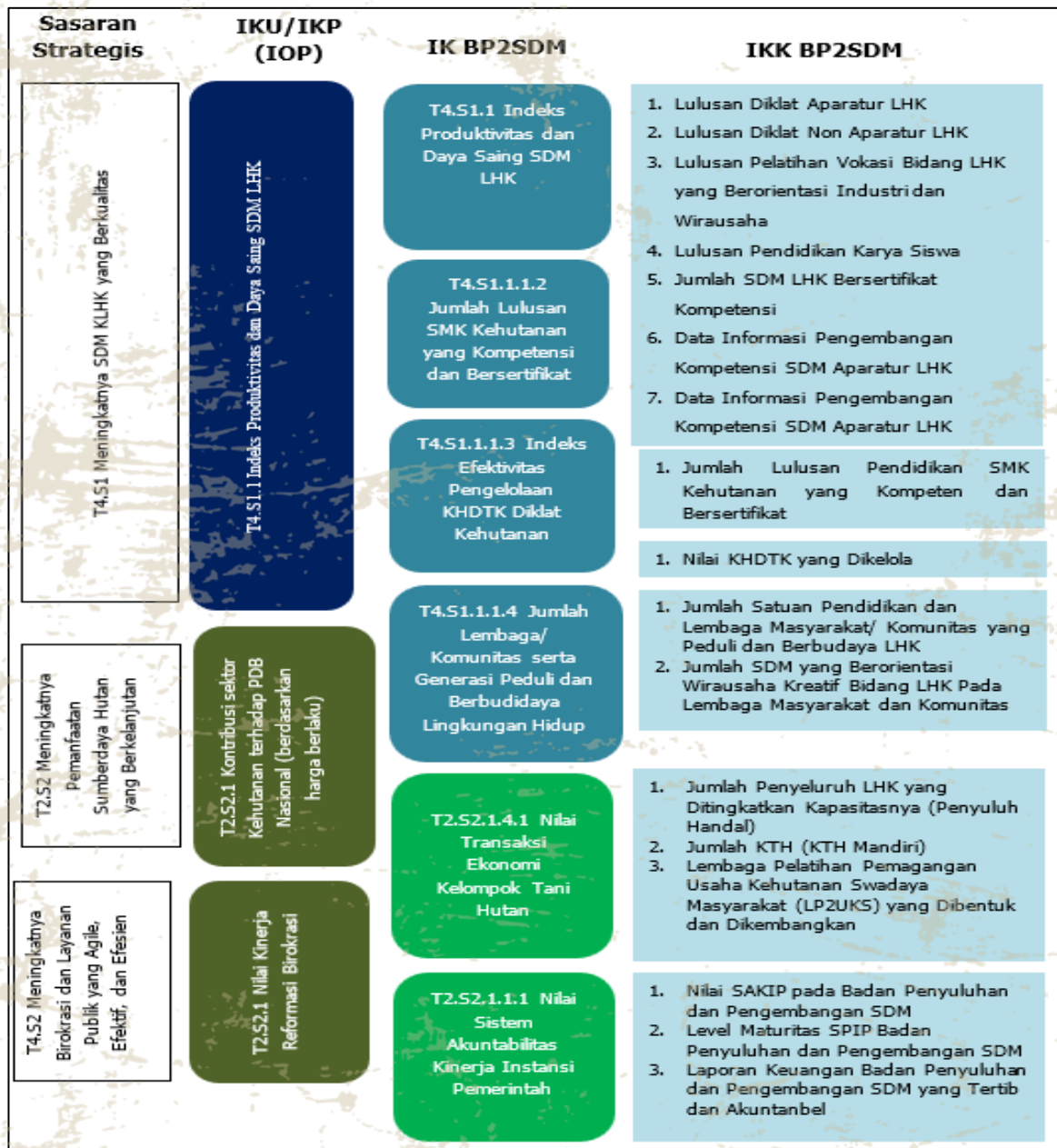
Dokumen Renstra Pusat Diklat SDM LHK merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam target kinerja yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK.208/DIK/PU/WASS.0/9/2020 tanggal 14 September 2020 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Adanya dinamika peraturan di Indonesia dimulai dari terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri LHK nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK yang sekaligus menyebabkan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian LHK. Menyikapi hal tersebut, Pusat Diklat SDM LHK melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan melalui Renstra (Revisi) Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3/DIK/TU/REN.0/1/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 208/DIK/PU/WAS.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Pusat Diklat SDM LHK mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 Nomor P.07/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 Tahun 2020-2024. Renstra Badan P2SDM sejalan dengan visi dan misi Kementerian LHK. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan tujuan Badan P2SDM adalah "Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat dan memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini. Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 Kementerian LHK yaitu "Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik".

Indikator utama yang didukung oleh Badan P2SDM yaitu (1) Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya; (2) Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat; (3) Indeks Efektifitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan; (4) Jumlah Lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup; (5) Nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan; dan (6) Nilai sistem akuntabilitas Instansi

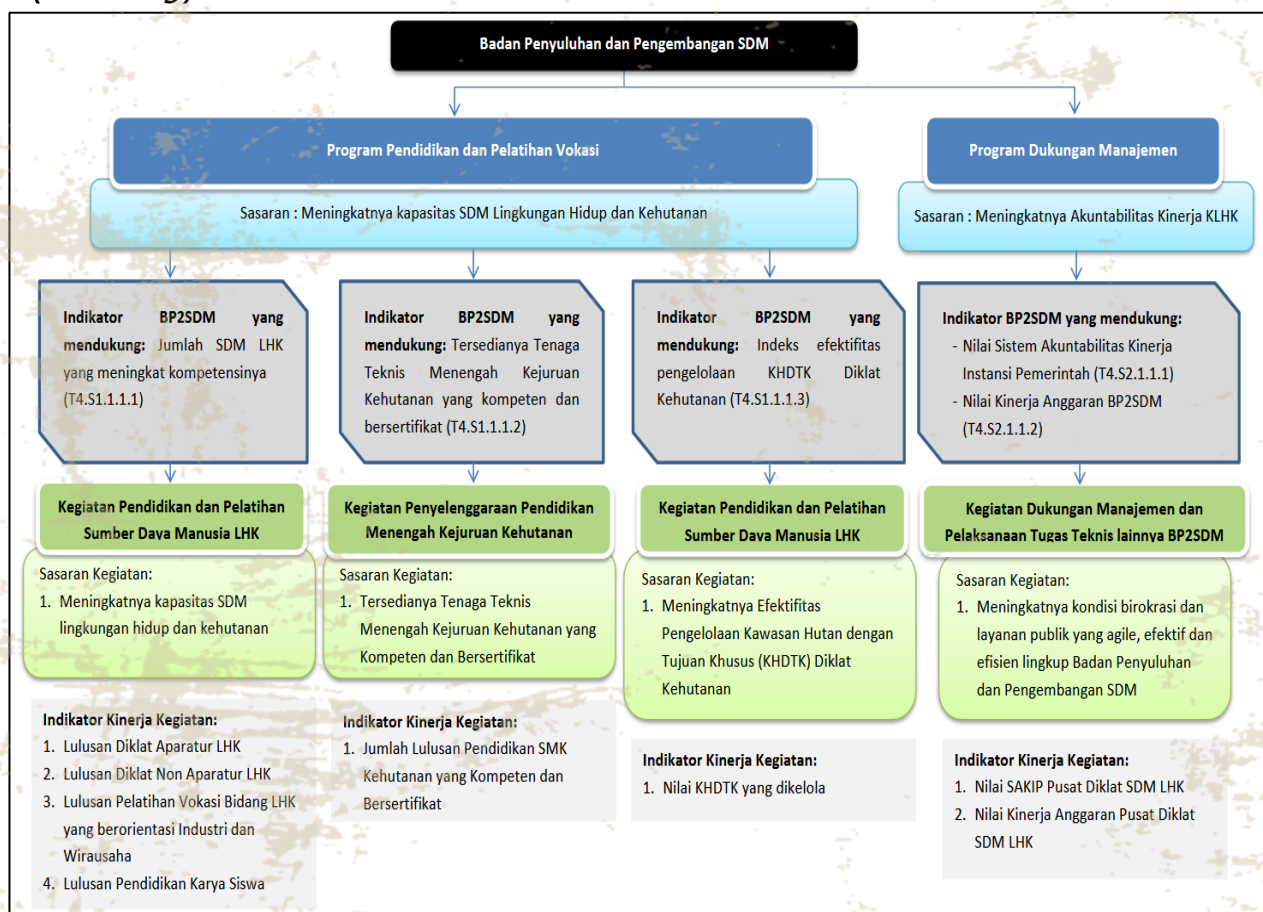
Pemerintah. Penjelasan mengenai proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah dicantumkan dalam bentuk cascading/pohon kinerja. secara lengkap terdapat dalam Cascading Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024 di bawah ini.



Gambar 6. Cascading Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024

Selanjutnya merujuk pada pohon kinerja (*cascading*) Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024 di atas, dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja kegiatan Badan P2SDM, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja

program dan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan yang diturunkan menjadi Pohon Kinerja (*cascading*) Pusat Diklat SDM LHK.



Gambar 7. Pohon Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

Pada pohon kinerja di atas, dapat dilihat indikator kinerja kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan Pusat Diklat SDM LHK yang tercantum dalam dokumen Renstra (Revisi) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024. Matriks Renstra (Revisi) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

Tabel 2. Matriks Renstra (Revisi) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024

No.	IKP	IKK	Target Renstra (Revisi) 2020 - 2024					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	Lulusan Diklat Aparatur LHK	2.731	1.342	391	660	830	5.954
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	7.050	2.744	670	690	3.996	15.150

		Lulusan Pendidikan Karya Siswa	23	35	20	10	137	225
2.	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten dan Bersertifikat	466	478	470	473	477	2.364
3.	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	66,5	67	68	69	70	70

## **B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Pusat Diklat SDM LHK ini merupakan dokumen yang bertujuan untuk mengarahkan program dan kegiatan pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024. Penyusunan RKT Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 berlandaskan pada program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah termaktub dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM LHK tahun 2020-2024.

RKT Tahun 2024 merupakan akhir periode dari Renstra Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024 yang berisi sasaran dan program serta rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 bertujuan agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan tugas serta fungsi Pusat Diklat SDM LHK yang nantinya dapat berlangsung secara akuntabel dan transparan. Dengan disusunnya RKT dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan kegiatan yang berhasil dan berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara semua pihak yang terkait baik internal maupun eksternal. RKT Pusat Diklat SDM LHK

tahun 2024 merupakan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan anggaran dalam lingkup Pusat Diklat SDM. Hal ini sejalan dengan sasaran tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK, sehingga dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien, serta dalam penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum dan tertib administrasi dan keuangan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM LHK, maka kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM LHK diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas aparatur dan pihak-pihak lain (*stake holder*) yang terkait dengan pembangunan LHK. Pada Rencana Kerja tahun 2024 pola mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pembelajaran *online* dan tatap muka (*Blended Learning*).

Selain itu, pada tahun 2024 Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK merencanakan akan menambah pelatihan dalam bentuk *Massive Open Online Course* (MOOC). Hal tersebut bertujuan agar cakupan pelatihan bisa lebih luas dengan waktu dan anggaran yang bisa lebih efisien.

Penyelenggaraan kegiatan Pusat Diklat SDM LHK terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan Kejuruan Kehutanan dengan 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu:

1. Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan;
3. Menyediakan Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat.

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran target yang sudah diberikan, Pusat Diklat SDM LHK dibantu oleh Balai Pelatihan LHK dan SMK Kehutanan Negeri lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK. Sebagai Unit Kerja Eselon II sasaran target Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK sudah mengakomodir sasaran target yang ada di Balai Pelatihan LHK dan SMK Kehutanan Negeri Lingkup KLHK.

### **C. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 merupakan perjanjian antara Kepala Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan P2SDM untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT Tahun 2024. Melalui perjanjian kinerja ini maka terjadi kesepakatan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Pada Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Pusat Diklat SDM LHK. Perjanjian kinerja awal ditetapkan pada tahun 2024 dengan target sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	4.335 orang
2.		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	1.240 orang
3.		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	7.840 orang
4		Lulusan Pendidikan Karyasiswa	10 orang
5.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang dikelola	70 poin
6.	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 orang
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM)			

7.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup BP2SDM	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	80 Poin
8.		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK	97,25 Poin

Penetapan perjanjian kinerja tahun 2024 Pusat Diklat SDM LHK mengalami revisi pertama pada bulan Juli tahun 2024. Revisi ini dilakukan melalui penyesuaian target IKK agar sejalan dengan pengurangan anggaran dari pagu awal sebesar Rp 49.202.369.000,- menjadi Rp. 41.517.369.000,-. Berikut Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Revisi Perjanjian Kinerja (awal) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	3.253 orang
2.		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	2.373 orang
3.		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	7.860 orang
4		Lulusan Pendidikan Karyasiswa	10 orang
5.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang dikelola	70 poin
6.	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 orang
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM)			
7.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup BP2SDM	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	80 Poin
8.		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK	97,25 Poin

Kemudian, Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 mengalami perubahan kembali pada bulan Desember sehingga ditetapkan Revisi Perjanjian Kinerja

antara Kepala Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan P2SDM. Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Revisi Perjanjian Kinerja (akhir) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	3.659 orang
2.		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	2.506 orang
3.		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	7.871 orang
4		Lulusan Pendidikan Karyasiswa	10 orang
5.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang dikelola	70 poin
6.	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 orang
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM)			
7.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup BP2SDM	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	80 Poin
8.		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK	82,5 Poin

Selengkapnya, dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 dan Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 terdapat pada lampiran 2.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Reviu terhadap Dokumen Perencanaan**

Berdasarkan perencanaan kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 yang mengacu pada dokumen perencanaan baik renstra, renja dan perjanjian kinerja terlihat bahwa terhadap perubahan atau revisi anggaran dan target IKK yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Pagu anggaran awal pada Pusat Diklat SDM LHK sebesar Rp. 49.202.369.000,- namun pada tahun berjalan terdapat beberapa revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 41.517.369.000,-.

Revisi Ke-1 Sesuai arahan melalui Memorandum Kepala BP2SDM nomor M.4/SETBP2SDM/BP2SDM/REN.4.II/B/01/2024 Pusat Diklat SDM LHK diharuskan melakukan Penandaan anggaran untuk Pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebanyak Rp. 1.410.000.000,-. Revisi-2 adalah revisi rutin dan update POK dan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman 3 (tiga) DIPA Triwulan I ke DJPb Kanwil Jawa Barat.

Kemudian revisi-3 adalah revisi rutin dan update POK dan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman 3 (tiga) DIPA Triwulan II ke DJPb Kanwil Jawa Barat. Selanjutnya, revisi-4 adalah revisi perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman 3 (tiga) DIPA Triwulan II ke DJPB Kanwil Jawa Barat.

Revisi-5 dilaksanakan sesuai dengan arahan memo Menteri LHK Nomor M.21/MENLHK/SETJEN/REN.4.12/B/6/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan memo Kepala Badan P2SDM Nomor M.14/P2SDM/SETBP2SDM/KEU.1/6/2024 tanggal 25 Juni 2024, adanya Realokasi belanja barang ke belanja pegawai untuk memenuhi belanja pegawai lingkup Badan P2SDM karena adanya Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu, revisi-6 adalah revisi perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman 3 (tiga) DIPA Triwulan III ke DJPB Kanwil Jawa Barat.

Revisi-7 adalah revisi DJA untuk Optimalisasi Belanja Barang ke Belanja Pegawai. Selanjutnya Revisi-8 adalah revisi perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman 3 (tiga) DIPA Triwulan IV ke DJPB Kanwil Jawa Barat.

Revisi Ke-9 adalah revisi karena adanya kebijakan *selfblocking* akun perjalanan dinas berdasarkan arahan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Kemudian ditindaklanjuti Kementerian LHK melalui Surat Direktorat Pelaksana Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 Tanggal 10 November 2024 perihal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Selanjutnya melalui Memorandum Kepala Badan P2SDM KLHK Nomor M.23/BP2SDM/PEHKT/REN.4.11/B/11/2024 Tanggal 11 November

2024 tentang Penyampaian Rincian Target Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas lingkup BP2SDM TA 2024, Pusat Diklat SDM LHK mendapatkan target penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 75.200.000,-. Rincian Penghematan Akun Perjalanan Dinas untuk Pusat Diklat SDM LHK diperoleh dari Kegiatan Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan KHDTK sebesar Rp. 40.868.000,- kemudian Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) sebesar Rp. 6.300.000,- selanjutnya dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan sebesar Rp. 12.642.000,- dan terakhir dari Bimtek Pengelolaan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot sebesar 15.390.000,-.

Revisi-10 merupakan revisi administrasi ke DJPB Kanwil Jawa Barat. Revisi-11 adalah revisi realokasi belanja barang ke belanja pegawai untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tahun anggaran 2024 ke DJPB Kanwil Jawa Barat. Terakhir, Revisi-12 merupakan revisi *update* POK Akhir Tahun 2024.

Berikut adalah kronologis revisi anggaran DIPA yang dilakukan oleh Pusat Diklat SDM LHK Tahun Anggaran 2024:

Tabel 6. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>NOMOR PENGESAHAN</b>
1	DIPA APBN	49.202.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 24 November 2023
2	REVISI-1 DJA  (Revisi Blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA))	49.202.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 25 Januari 2024
3	REVISI-2 KanWil DJPb Jawa Barat  (Revisi Halaman III DIPA Triwulan I)	49.202.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 6 Februari 2024
4	REVISI-3 KanWil DJPb Jawa Barat  (Revisi Halaman III DIPA Triwulan II)	49.202.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 1 April 2024
5	REVISI-4 KanWil DJPb Jawa Barat  (Revisi Halaman III DIPA Triwulan II (Reformulasi IKPA))	49.202.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 27 Mei 2024

6	REVISI-5 DJA  (Revisi Pemenuhan Belanja Pegawai (Tunjin 80%) Lingkup BP2SDM)	41.517.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 2 Juli 2024
7	REVISI-6 KanWil DJPb Jawa Barat  (Revisi Halaman III DIPA Triwulan III)	41.517.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 11 Juli 2024
8	REVISI-7 DJA  (Revisi Pemenuhan Belanja Pegawai s.d. Bulan Desember Tahun 2024 Tahap II (Realokasi Belanja Barang Operasional 002 (52) Ke Belanja Pegawai (51)))	41.517.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 2 Oktober 2024
9	REVISI-8 KanWil DJPb Jawa Barat  (Revisi Halaman III DIPA Triwulan IV)	41.517.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
10	REVISI-9 KanWil DJPb Jawa Barat  (Revisi Penghematan Perjalanan Dinas ( <i>Selfblocking</i> ))	41.517.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 14 November 2024
11	REVISI-10 KanWil DJPb Jawa Barat  (Revisi Pergeseran Anggaran dalam hal Pagu Tetap)	41.517.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 29 November 2024
12	REVISI-11 KanWil DJPb Jawa Barat  (Revisi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja) karena perubahan PPh 21 tarif TER (Realokasi Belanja Barang Operasional 002 (52) ke Belanja Pegawai (51)))	41.517.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 09 Desember 2024

13	REVISI-12 KanWil DJPb  (Revisi Pemutakhiran Data POK Tahun Anggaran 2024)	41.517.369.000,-	SP DIPA – 029.08.1.400210/2024 Tanggal 30 Desember 2024
----	---	------------------	--

Sejalan dengan adanya perubahan pagu anggaran, merujuk pada revisi perjanjian kinerja (akhir) Pusat Diklat SDM Tahun 2024 terdapat perubahan IKK Pusat Diklat SDM LHK. Perubahan IKK Pusat Diklat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Perubahan Target IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Akhir
1.	Lulusan Diklat Aparatur LHK	3.253 orang	3.659 orang
2.	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	2.373 orang	2.506 orang
3.	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	7.860 orang	7.871 orang
4.	Lulusan Pendidikan Karyasiswa	10 orang	10 orang
5.	Nilai KHDTK yang dikelola	70 poin	70 poin
6.	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 orang	491 orang
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM)			
7.	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	80 Poin	80 Poin
8.	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK	97,25 Poin	82,5 Poin

## B. Reviu Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Badan P2SDM Tahun 2024

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan akuntabilitas kinerja satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2024, Kepala Badan P2SDM cq Sekbadan P2SDM telah menerbitkan Memorandum perihal Hasil Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024 dan Penilaian Laporan Kinerja Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2023. Berdasarkan memo tersebut, Pusat Diklat SDM LHK telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dan telah mengupload pada eSAKIP KLHK tepat waktu. Penilaian terhadap Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 mendapatkan hasil

terbaik lingkup satker BP2SDM namun demikian terdapat kelemahan yang diharapkan dapat diperbaiki pada penyusunan LKj Tahun 2024.

Selain itu, Pusat Diklat SDM LHK pada Tahun 2024 menjadi salah satu Satker lingkup BP2SDM yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP melalui eSAKIP KLHK sehingga mendapatkan pengurangan nilai (-1) menjadi 83,81 poin. Kedepannya, hal tersebut diupayakan dapat diperbaiki dan dibenahi dengan adanya kerjasama, koordinasi dan kemudahan mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian mandiri SAKIP agar pengumpulan hasil bisa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti Hasil Reviu Penilaian Mandiri SAKIP dari BP2SDM secara umum bagi seluruh satker termasuk Pusat Diklat SDM LHK yaitu diantaranya adalah :

Tabel 8. Tindak Lanjut Hasil Reviu Penilaian Mandiri SAKIP dari BP2SDM Tahun 2024

1	Perencanaan Kinerja	Format dokumen perencanaan masih banyak yang belum sesuai dengan pedoman yang ada	Pusat Diklat SDM LHK telah mempedomani <i>outline</i> penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, Renaksi, Perjanjian Kinerja) sesuai yang tercantum pada Keputusan Menteri LHK nomor 975 tahun 2023.
		Pada dokumen Rencana Aksi masih belum semua mencantumkan target bulan dan memberikan narasi penjelasan per triwulan	Pusat Diklat SDM LHK sudah menyusun dokumen Rencana Aksi yang telah mencantumkan target bulan dan memberikan narasi penjelasan per triwulan.
		Belum semua satker Menyusun pohon kinerja yang menggambarkan pembagian peran kerja antar bidang	Pusat Diklat SDM LHK telah menyusun dan mencantumkan cascading/pohon kinerja di dalam dokumen perencanaan dan LKj tahun 2024 yang telah berupaya menggambarkan pembagian peran kerja antar bidang melalui Tim kerja yang ditetapkan.
2	Pengukuran Kinerja	Masih terdapat beberapa satker yang belum menunjukkan keterlibatan pimpinan dalam pengambilan	Pusat Diklat SDM LHK akan berupaya mendokumentasikan setiap pertemuan rutin antara para

		keputusan yang dapat dibuktikan dengan undangan rapat, daftar hadir, dokumentasi dan notulen rapat	Ketua Tim Kerja dengan Kepala Pusat Diklat SDM LHK melalui undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi dan notulen rapat.
3.	Pelaporan Kinerja	Pusat Diklat SDM LHK masih kurang dalam memberikan gambaran umum/penjelasan singkat pada masing – masing IKK, memberikan penjelasan terhadap faktor – faktor pendukung pencapaian kinerja, dan belum memuat <i>outcome</i> setiap IKK dan analisis pembahasannya	Pusat Diklat SDM LHK telah mengoptimalkan untuk mengupayakan memberikan gambaran umum/penjelasan singkat pada masing – masing IKK, penjelasan terhadap faktor – faktor pendukung pencapaian kinerja, dan memuat <i>outcome</i> setiap IKK beserta analisis pembahasannya pada Laporan Kinerja Tahun 2024.
4	Evaluasi Internal	Belum seluruh satker mengadakan dan mendokumentasikan pertemuan rutin yang membahas mengenai evaluasi akuntabilitas internal untuk mengidentifikasi kendala dalam pencapaian kinerja satker sebagai wujud keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja satker.	Pusat Diklat SDM LHK telah mengadakan serta mendokumentasikan pertemuan melalui rapat seluruh ketua tim kerja secara berkala dalam rangka upaya pencapaian kinerja serta anggaran yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK.

### C. Metode Pengukuran

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan dari target kinerja Pusat Diklat SDM LHK dilakukan pengukuran kinerja diantaranya adalah capaian kinerja, efektivitas kinerja, efisiensi kinerja dan capaian progres renstra tahun 2020-2024. Adapun formula selengkapnya sebagaimana berikut:

#### 1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan capaian rencana dan/atau keberhasilan capaian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Capaian Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja tahun berjalan}}{\text{Target kinerja tahun berjalan}} \times 100\%$$

### 1. Efektivitas Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran/*outcome* tahun berjalan dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, cara penilaian efektivitas pelaksanaan kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Apabila Efektivitas kinerja  $\geq 1$  berarti efektif sedangkan apabila efektivitas kinerja  $< 1$  berarti tidak efektif.

### 2. Efisiensi Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran tahun berjalan dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) tahun sebelumnya dengan capaian kinerja (fisik) tahun berjalan. Rumus pengukuran efisiensi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\% \text{ Realisasi anggaran tahun 2024}}{\% \text{ Realisasi kinerja fisik}} \times 100\%$$

Apabila hasil perbandingan yang diperoleh  $> 1$  maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk kategori tidak efisien. Apabila perbandingan yang dihasilkan  $\leq 1$ , maka capaian kinerja sasaran termasuk kategori efisien.

### 3. Progres Capaian Renstra

Pengukuran progres Renstra dilakukan dengan membandingkan capaian periode Renstra tahun berjalan dengan target Renstra Tahun 2020 – 2024. Untuk melakukan pengukuran capaian Renstra digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Renstra} = \frac{\sum \text{Realisasi 2020} - 2024}{\text{Target 2020 s. d. 2024}} \times 100$$

## D. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

### 1. Pengukuran Capaian Kinerja

Implementasi kegiatan Pusat Diklat SDM LHK sesuai nomenklatur dokumen perencanaan terakomodir dalam indikator kinerja kegiatan. Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing IKK. Hasil pengukuran capaian kinerja selengkapnya tabel berikut :

Tabel 9. Realisasi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	IKK	Target	Realisasi	Persentase
1.	Lulusan Diklat Aparatur LHK	3.659 orang	3.683 orang	100,66%
2.	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	2.506 orang	2.507 orang	100,04%
3.	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	7.871 orang	7.871 orang	100,00%
4.	Lulusan Pendidikan Karyasiswa	10 orang	11 orang	110,00%
5.	Nilai KHDTK yang dikelola	70 poin	75.26 poin	107,51%
6.	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 orang	487 orang	99,19%
Rata - rata				<b>102,90%</b>
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM)				
7.	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	80 poin	83,81 poin	104,76%
8.	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK	82,5 poin	98,34 poin	119,20%

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Pusat Diklat SDM LHK telah mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 102,90%. Persentase capaian kinerja IKK Pusat Diklat SDM LHK tahun 2024 semuanya telah terpenuhi bahkan telah melampaui target yang dicapai.

### 1. Efektivitas Capaian Kinerja

Efektivitas capaian kinerja merupakan perbandingan persentase capaian kinerja tahun 2024 dengan persentase capaian kinerja tahun 2023. Hasil pengukuran efektivitas kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10. Pengukuran Efektivitas Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024



No.	IKK	Presentase Kinerja Tahun 2024	Presentase Kinerja Tahun 2023	Efektivitas	Kategori
1.	Lulusan Diklat Aparatur LHK	100,66%	100,12%	1,01	Efektif
2.	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	100,04%	100,45%	1,00	Tidak Efektif
3.	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	100,00%	100,34%	1,00	Efektif
4.	Lulusan Pendidikan Karyasiswa	110,00%	100,00%	1,10	Efektif
5.	Nilai KHDTK yang dikelola	107,51%	108,04%	1,00	Tidak Efektif
6.	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	99,19%	100,00%	0,99	Tidak Efektif
		102,90%	101,49%	1,01	Efektif

Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK memiliki hasil perbandingan efektivitas dengan status **Efektif** dengan rata – rata sebesar 1,01 (> 1). Rasio yang dihasilkan >1 menunjukkan efektivitas capaian kinerja pada Tahun 2024 menurun dibandingkan Tahun 2023. Dari penghitungan persentase kinerja Tahun 2024 yang dibandingkan dengan persentase kinerja Tahun 2023, terdapat 3 IKK yang dikategorikan **Tidak Efektif** yaitu Lulusan Diklat Non Aparatur LHK, Nilai KHDTK yang dikelola, dan Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat. Terdapat beberapa alasan penyebab ketidakefektifan dari 3 IKK dimaksud yang perlu dianalisis dan dievaluasi lebih lanjut.

### 3. Efisiensi Capaian Kinerja

Efisiensi capaian kinerja merupakan persentase realisasi anggaran tahun 2024 dibandingkan dengan persentasi kinerja (fisik) tahun 2024. Hasil Pengukuran efisiensi kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11. Efisiensi Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	IKK	Presentase Realisasi Anggaran Tahun 2024	Presentase Kinerja Tahun 2024	Efisiensi
1.	Lulusan Diklat Aparatur LHK	99,94%	100,66%	0,99
2.	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	94,06%	100,04%	0,94

3.	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	96,61%	100,00%	0,97
4.	Lulusan Pendidikan Karyasiswa	99,25%	110,00%	0,90
5.	Nilai KHDTK yang dikelola	86,37%	107,51%	0,80
6.	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	63,20%	99,19%	0,64
		96,35%	102,90%	<b>0,94</b>

Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK memiliki rasio efisiensi dengan status **Efisien** dengan rata – rata sebesar 0,94 ( $\leq 1$ ). Dari hasil pengukuran efisiensi kinerja Tahun 2024, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 baik anggaran dan fisik telah sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah dibuat. Efisiensi kinerja tertinggi pada tahun 2024 terdapat pada IKK Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat dengan nilai 0,64. Sedangkan untuk efisiensi kinerja paling optimal terdapat pada IKK Lulusan Diklat Aparatur LHK dengan presentase realisasi anggaran dan persentase kinerja fisik dengan nilai efisiensi 0,99.

#### 4. Capaian Progres Renstra Tahun 2020 – 2024

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang ada pada renstra Pusat Diklat SDM LHK menunjukkan bahwa realisasi belum terpenuhi sesuai yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 merupakan tahun terakhir penjabaran Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Secara rinci, rasio/perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Renstra disajikan sebagaimana Tabel 11.

Tabel 12. Progress Renstra Pusat Diklat SDM LHK sampai dengan Tahun 2024

No.	IKK	Target Renstra 2020-2024	Realisasi Renstra 2020-2024					Capaian Kinerja sampai Tahun 2024	% Progress Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Lulusan Diklat Aparatur LHK	5.954	2.731	3.118	391	2.552	3.683	12.475	150,00%
2.	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	15.150	7.050	2.744	670	2.031	2.507	15.002	99,02%
3.	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK	35.000	-	1.338	661	886	7.871	10.756	30,73%

	yang berorientasi Industri dan Wirausaha								
4.	Lulusan Pendidikan Karyasiswa	225	17	35	15	10	11	88	39,11%
5.	Nilai KHDTK yang dikelola	70	66,50	67,81	74,86	74,55	75,26	75,26	107,51%
6.	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	2.364	467	475	470	472	487	2.371	100,13%
									<b>87,75%</b>

Berdasarkan tabel di atas persentase progress renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 87,75%. Dari hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode Renstra 2020-2024 tidak tercapai.

## 5. *Benchmarking* Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja, Pusat Diklat SDM LHK telah melakukan *benchmarking* ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober Tahun 2024. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, anggota DPRD dan aparatur desa berdasarkan amanat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

Pemilihan lokasi *benchmarking* ke BPSDM Provinsi Jawa Timur adalah selain telah mendapat pengakuan sebagai *Corporate University* juga dikarenakan BPSDM Jatim sudah menyelenggarakan Webinar ASN Belajar yang banyak diikuti oleh ASN seluruh Indonesia termasuk ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Tahun 2023, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa nilai sebesar 92,45 dengan predikat "AA".



Gambar 8. Pelaksanaan *Benchmarking* ke BPSDM Provinsi Jawa Timur

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Memuaskan", yaitu telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja BPSDM Jawa Timur sehingga terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform*).

Berdasarkan hasil pelaksanaan *benchmarking* yang dilakukan, Tim Pusat Diklat SDM LHK telah berdiskusi mengenai capaian kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 maupun pada tahun 2024 berjalan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, anggota DPRD dan aparatur desa, BPSDM Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan diklat aparatur yang dalam pelaksanaannya mencakup aspek program, SDM dan sarana prasarana.

Adapun target dan realisasi kinerja pada BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
	Nilai SAKIP	81,59	92,45	113,31

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase peserta pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,3	100	123,00
	Persentase Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,3	100	123,00
	Persentase peserta pelatihan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,3	100	123,00
	Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi	81,3	99,32	122,16
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	100,00	100,00	100,00
	Persentase realisasi anggaran	85,3	91,43	107,19
	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>85,3</b>	<b>80,045</b>	<b>93,83</b>
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	81,3	103,74	127,60
	Persentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	81,3	130,10	160,03
	Persentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	81,3	121,11	148,97
	Persentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	81,3	100	123

Secara umum, pelaksanaan program kegiatan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan capaian pada kedua sasaran strategis yaitu Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan Meningkatkan Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional didapatkan capaian kinerja tahun 2023 rerata sebesar **105,27%**. Sementara itu, untuk realisasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023 sebesar Rp.139.750.193.455,- dari pagu P-APBD 2023 sebesar Rp.152.895.622.365,- atau 91,40 %.

Keseluruhan realisasi di Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Adapun analisis pada indikator kegiatan yang capaiannya melebihi target karena beberapa faktor penunjang yang mendukung diantaranya : tingginya kebutuhan pengembangan kompetensi (pelatihan) bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan, tingginya kebutuhan pengembangan kompetensi (pelatihan) dari *stakeholder* yang dilaksanakan melalui pembiayaan retribusi pelayanan Pendidikan, dan A adanya penambahan pelatihan teknis guna memenuhi kebutuhan prioritas yaitu :

- Pelatihan Pra Paralegal *Justice Award* Untuk Kepala Desa/Lurah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa

Adapun kendala/faktor penghambat yang dihadapi oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur terhadap indikator kegiatan yang belum memenuhi dengan target yang ditetapkan yaitu adanya pembatalan kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan melalui pembiayaan retribusi pelayanan Pendidikan sehingga mengurangi jumlah peserta yang mengikuti penilaian dan uji kompetensi.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2024, BPSDM Provinsi Jawa Timur data sementara yang kami peroleh baru sampai Bulan September 2024. Kami berkesempatan untuk berdiskusi dengan Widyaiswara Ahli Madya, Analis Bangkom Ahli Muda, Ketua Tim Kerja Bidang Kepegawaian dan Evaluasi beserta tim pengelola SAKIP pada BPSDM Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan terdapat beberapa inovasi dari BPSDM Provinsi Jawa Timur yang dapat dijadikan masukan bagi pengelolaan kinerja di Pusat Diklat SDM LHK diperoleh diantaranya yaitu: Indeks profesionalisme ASN sampai dengan bulan September 2024 telah mencapai 91,48%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya kewajiban dari setiap pegawai untuk menginput kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan secara rutin melalui Aplikasi SIBANGKODIR (Sistem Pengembangan Kompetensi Mandiri) yaitu aplikasi untuk mengontrol IP ASN semacam bank data untuk ASN se-Jawa Timur. Aplikasi ini hanya diakses oleh pegawai ASN Provinsi Jawa Timur. Tingginya indeks profesionalisme ASN dapat dicapai melalui penghitungan yang dilaksanakan oleh Analis Pengembangan Kompetensi disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terkait kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang diperoleh dari

kegiatan rapat koordinasi pengembangan kompetensi yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik kota/kabupaten lingkup Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya hasil dari Rakorbangkom tersebut akan dimasukkan ke dalam inventarisasi usulan pengembangan kompetensi guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen rencana kerja tahunan. Perencanaan ini harus *in line* renstra dan rencana aksi daerah (masing-masing UPTD). Penganggaran kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai lingkup Provinsi Jawa Timur selain berasal dari anggaran BPSDM Provinsi Jawa Timur juga melalui Retribusi layanan Pendidikan (bukan PNPB) yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur yaitu layanan kemitraan dimana mitra yang menganggarkan untuk kegiatan pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai yang membutuhkan. Sama halnya seperti ASN Kementerian/Lembaga, ASN Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk mengumpulkan kegiatan pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 JP. Apabila belum mencapai 20 jp, diumumkan di WAG yang dikelola oleh Pengelola Kepegawaian sehingga hal tersebut tidak lepas dari pengawasan Pimpinan. Kemudian terdapat pengisian laporan bulanan untuk setiap individu yang mana akan terhubung dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) BPSDM Provinsi Jawa Timur. Terdapat apresiasi atau *reward* bagi pegawai yang telah mencapai pengembangan kompetensi yang sesuai atau melebihi target yang ditetapkan berupa fasilitasi untuk mengikuti pelatihan bahkan dalam bentuk pemberian Umroh. BPSDM Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi pegawai lingkup BPSDM untuk ikut pelatihan selama pegawai tersebut mengajukan diri untuk ikut pelatihan, namun diprioritaskan untuk pegawai yang berprestasi.

Terakhir, salah satu inovasi terbaik yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur yaitu Webinar ASN Belajar. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ini telah

	<p><b>Webinar ASN Belajar Seri 1 - Leadership Update Forum "Lead With Impact"</b> BPSDM JATIM TV • 28K views • Streamed 1 year ago</p>
	<p><b>Webinar ASN Belajar Seri 2 - Manajemen Perubahan : Bagaimana Penerapannya di Sektor Publik ?</b> BPSDM JATIM TV • 106K views • Streamed 11 months ago</p>
	<p><b>Webinar ASN Belajar Seri 3 - Future Competency ASN : Apa Saja ?</b> BPSDM JATIM TV • 59K views • Streamed 11 months ago</p>
	<p><b>Webinar ASN Belajar Seri 4 - Birokrasi Berkelas Dunia "Apa dan Bagaimana Mewujudkannya"</b> BPSDM JATIM TV • 36K views • Streamed 11 months ago</p>

dilaksanakan dari tahun 2022 dan terus berlanjut pada tahun 2024 sampai seri 46. Webinar ini merupakan salah satu upaya BPSDM Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai khususnya lingkup BPSDM. Webinar ini diselenggarakan secara professional dan mendapat dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun komitmen pimpinan dalam hal ini Kepala Badan PSDM Provinsi Jawa Timur untuk terus mengawal dalam setiap kegiatannya yang dilaksanakan setiap minggu. Webinar ini memiliki tema yang beragam yang disesuaikan dengan situasi maupun momen tertentu seperti yang berkaitan dengan Tema Hari Ibu atau Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bahkan tentang momentum bulan Ramadhan. Pelaksanaan webinar ini juga dapat diikuti secara luas termasuk ASN Kementerian LHK sebagai upaya pemenuhan pengembangan kompetensinya. Selain itu terdapat pula pelatihan dengan metode MOOC untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan bagi jabatan fungsional yang terdapat pada lingkup Provinsi Jawa Timur.

Gambar 9. Pelaksanaan Webinar ASN Belajar Seri Tahun 2024 yang dilaksanakan BPSDM Provinsi Jawa Timur

## E. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Pusat Diklat SDM LHK memerlukan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Berikut ini merupakan penjelasan dari evaluasi dan analisis masing – masing IKK Pusat Diklat SDM LHK.

### 1. Lulusan Diklat Aparatur LHK

Pelatihan Aparatur SDM LHK merupakan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap serta keterampilan aparatur dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan teknis, fungsional, atau administrasi/manajerial. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan Nasional, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara lingkup KLHK.

Pelatihan Aparatur SDM LHK yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 oleh Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Pelatihan SDM Aparatur LHK di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
1	ToF Internalisasi Nilai BerAKHLAK	27 s.d. 28 Feb 2024	62	22	40	62
2	TOF Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM LHK	12 s.d. 22 Feb 2024	105	48	57	105



No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
3	Pelatihan Nilai Ekonomi Karbon Dalam Rangka Pencapaian Target Nationally Determined Contribution	19 s.d 23 Feb 2024	38	22	16	38
4	Pelatihan PEDAL angkatan I	04 s.d. 27 Maret 2024	30	10	20	30
5	Pelatihan PEDAL angkatan II	18 s.d. 27 Maret 2024	30	11	19	30
6	Pelatihan PEH Terampil Angkatan I	19 s.d. 28 Maret 2024	30	21	9	30
7	Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18/03/2024 s.d. 26/03/2024	29	13	16	29
8	Pelatihan Pembentukan (Reguler) Polisi Kehutanan Tahun 2024	19/02/2024 s.d. 01/04/2024	263	213	50	263
9	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-1	20/03/2024 s.d. 26/04/2024	40	28	12	40
10	Pelatihan Penilaian Sumber Benih Tanaman Hutan	25/04/2024 s.d. 03/05/2024	36	21	15	36
11	TOT Pelatihan Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi Tahun 2024	01/04/2024 s.d. 05/04/2024	40	28	12	40
12	Pelatihan PEDAL Angkatan III	13/05/2024 s.d. 22/05/2024	29	16	13	29
13	Pelatihan PEH Terampil Angkatan 2	16/05/2024 s.d. 30/05/2024	30	13	17	30
14	Pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah level 1 Angkatan 2	03/06/2024 s.d. 21/06/2024	40	21	19	40

No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
15	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1	27/02/2024 s.d. 18/07/2024	40	31	9	40
16	Pelatihan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Angkatan I	08/07/2024 s.d. 18/07/2024	30	16	14	30
17	Pelatihan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Angkatan II	15/08/2024 s.d. 31/08/2024	30	21	9	30
18	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I	01/04/2024 s.d. 16/08/2024	38	32	6	38
19	Pelatihan Dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan 1	02/09/2024 s.d. 21/09/2024	38	17	21	38
20	Pelatihan Dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan 2	02/09/2024 s.d. 21/09/2024	38	20	18	38
21	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 2	13/05/2024 s.d. 13/09/2024	40	32	8	40
22	Pelatihan inventarisasi Hutan Nasional (2.0) Angkatan 1	05/08/2024 s.d. 13/08/2024	40	29	11	40
23	Pelatihan Inventarisasi Hutan Nasional (2.0) Angkatan 2	19/08/2024 s.d. 27/08/2024	39	31	8	39
24	Pelatihan Inventarisasi Hutan Nasional (2.0) Angkatan 3	02/09/2024 s.d. 10/09/2024	39	32	7	39
25	Pelatihan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C (Kerjasama Biro Umum)	13/05/2024 s.d. 11/07/2024	248	198	50	248
26	Pelatihan Pengawas Lingkungan Hidup angkatan III	07/10/2024 s.d. 25/10/2024	39	21	18	39

No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
27	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II	11/06/2024 s.d. 11/10/2024	38	32	6	38
28	Pelatihan Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC)	02/09/2024 s.d. 16/10/2024	100	82	18	100
29	Pelatihan Dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan 4	07/10/2024 s.d. 01/11/2024	36	21	15	36
30	Pelatihan Dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan 5	04/11/2024 s.d. 22/11/2024	49	22	27	49
31	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Angkatan 3	30/09/2024 s.d. 04/10/2024	20	16	4	20
32	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama Dengan Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Angkatan 4	07/10/2024 s.d. 11/10/2024	20	10	10	20
33	Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Berkesadaran Hukum	22/10/2024 s.d. 24/10/2024	40	40	0	40
<b>Jumlah</b>			<b>1764</b>	<b>1190</b>	<b>574</b>	<b>1764</b>

\*Keterangan : Lk = Laki – laki, Pr = Perempuan

Tabel 15. Realisasi Pelatihan SDM Aparatur LHK di Balai Pelatihan LHK Tahun 2024

No.	BPLHK	Peserta Pelatihan (orang)	
		Target	Realisasi
1	BPLHK Kadipaten	1.119	1.119

No.	BPLHK	Peserta Pelatihan (orang)	
		Target	Realisasi
2	BPLHK Bogor	60	60
3	BPLHK Pekanbaru	140	140
4	BPLHK Samarinda	186	186
5	BPLHK Pematang Siantar	60	60
6	BPLHK Makassar	294	294
7	BPLHK Kupang	60	60
Jumlah		<b>1.919</b>	<b>1.919</b>

Hasil pengukuran capaian kinerja untuk Lulusan Diklat Aparatur LHK tahun 2024, dari target capaian sebanyak 3.659 orang dapat terealisasi sebanyak 3.683 orang atau berhasil melampaui target sebesar 100,66%. Pada tahun 2024, ketercapaian target kinerja untuk lulusan diklat aparatur LHK dikarenakan adanya revisi perjanjian kinerja yang menyesuaikan dengan PAGU anggaran yang tersedia. Selain itu, seperti halnya tahun 2023, masih terdapat intervensi mekanisme anggaran sehingga pelatihan-pelatihan kerjasama bisa diklaim sebagai IKK Pusat Diklat SDM LHK. **Efisiensi** capaian kinerja untuk Lulusan Diklat Aparatur LHK tahun 2024 juga telah dinilai efisien yaitu 0,99 berdasarkan perbandingan persentase realisasi anggaran sebesar 99,94% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,66%.

Selanjutnya melihat pengukuran **efektivitas** capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, diperoleh hasil bahwa untuk lulusan diklat aparatur LHK termasuk kategori efektif yaitu 1,01. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 sama baiknya dengan capaian kinerja tahun 2023.

Untuk **progress capaian kinerja** sampai dengan tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir renstra tahun 2020-2024, dari target sebanyak 5.954 orang telah terealisasi sebanyak 12.475 orang lulusan. Presentase progress capaian kinerja sampai tahun 2024 melebihi 209,5% namun demikian dibatasi maksimal 150%. Penambahan target kinerja pada tahun 2024 berpengaruh signifikan terhadap progress capaian kinerja lulusan diklat Aparatur LHK.

Secara umum capaian kinerja sejak tahun 2020-2024 selalu melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pelaksanaan pelatihan pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena telah menambahkan penghitungan kinerja melalui mekanisme kerjasama sama seperti tahun 2023. Adanya pelatihan melalui

mekanisme kerjasama menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian kinerja lulusan diklat aparatur SDM LHK sehingga diharapkan dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

**Kendala** yang dihadapi hampir pada setiap tahun renstra 2020 – 2024 adalah belum konsistennya data yang diberikan baik dalam jumlah pelatihan maupun peserta pelatihan yang diselenggarakan Pusat Diklat SDM LHK maupun Balai – Balai Pelatihan LHK. **Rekomendasi** yang disarankan diharapkan pada pelaksanaan IKK lulusan diklat Aparatur LHK yaitu perlunya perencanaan jumlah pelatihan aparatur yang lebih spesifik, terukur, relevan sehingga dapat tercapai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja dan rencana strategis selama 5 tahun ke depan.

**Output** dari indikator kinerja kegiatan yaitu terwujudnya jumlah SDM LHK yang lulus pelatihan Aparatur LHK. **Outcome** yang dihasilkan dari IKK ini yaitu meningkatnya kinerja pegawai Kementerian LHK yang meningkat kompetensi melalui pelatihan guna mendukung tercapainya tujuan organisasi Kementerian LHK.

## 2. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK

Pelatihan Non Aparatur LHK merupakan pelatihan yang diperuntukkan bagi SDM Non Aparatur LHK, baik Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah seperti Pemerintah Daerah, Pegawai Swasta Perguruan Tinggi atau Swasta, Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Peduli Api (MPA), Tenaga Teknis Lapangan, maupun perseorangan/masyarakat umum untuk menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur atau lembaga non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pada Tahun 2024, Pelatihan Non Aparatur LHK dioptimalkan melalui pelatihan dengan mekanisme kerjasama.

Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 oleh Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Pelatihan SDM Non Aparatur LHK di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
1	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama LPP Wana Wiyata	22/01/2024 s.d. 27/01/2024	30	22	8	30
2	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas	24/01/2024 s.d. 30/01/2024	16	4	12	16

No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
3	Pelatihan Penyusunan Amdal Kerjasama dengan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan	19/02/2024 s.d. 15/03/2024	24	20	4	24
4	Pelatihan Penyusunan Amdal Kerjasama dengan LPK AMI Angkatan I (Kelas A)	21/02/2024 s.d. 18/03/2024	30	18	12	30
5	Pelatihan Penyusunan Amdal Kerjasama dengan LPK AMI Angkatan II (Kelas B)	21/02/2024 s.d. 18/03/2024	30	21	9	30
6	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan	26/02/2024 s.d. 01/03/2024	14	10	4	14
7	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Gadjah Mada Angkatan II	26/02/2024 s.d. 01/03/2024	11	9	2	11
8	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Gadjah Mada Angkatan I	26/02/2024 s.d. 01/03/2024	30	17	13	30
9	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan PT Eco Edu Indonesia	27/02/2024 s.d. 05/03/2024	29	20	9	29
10	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	18/03/2024 s.d. 22/03/2024	17	4	13	17

No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
11	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan UNS	22/04/2024 s.d. 26/04/2024	22	12	10	22
12	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	22/04/2024 s.d. 27/04/2024	60	38	22	60
13	Pelatihan Penyusunan Amdal Kerjasama dengan PT Inka Lingkungan Indonesia (PT INKALINDO)	13/05/2024 s.d. 18/05/2024	30	17	13	30
14	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan PT Eco Edu Indonesia Angkatan II	23/05/2024 s.d. 05/06/2024	30	16	14	30
15	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	27/05/2024 s.d. 01/06/2024	60	34	26	60
16	Pelatihan Dasar Amdal pada PT Inka Lingkungan Indonesia (PT INKALINDO)	03/06/2024 s.d. 08/06/2024	27	16	11	27
17	Penilaian Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	03/06/2024 s.d. 15/06/2024	30	12	18	30
18	Pelatihan Dasar Amdal Angkatan II Tahun 2024 Kerjasama Pusat Diklat SDM LHK dengan LPP Wana Wiyata	10/06/2024 s.d. 15/06/2024	23	11	12	23
19	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan Pusat	12/06/2024 s.d. 21/06/2024	30	18	12	30

No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
	Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada					
20	Pelatihan Pengenalan Jenis Kayu	16/04/2024 s.d. 20/04/2024	32	26	6	32
21	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan LPK AMI	30/01/2024 s.d. 06/02/2024	30	19	11	30
22	Pelatihan Pembentukan Tenaga Teknis Lapangan Rehabilitasi Mangrove dan pelantikan kerangka pengaman sosial Tahun 2024	15/03/2024 s.d. 24/03/2024	127	86	41	127
23	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan PT. Inka Lingkungan Indonesia (INKALINDO)	19/02/2024 s.d. 24/02/2024	30	19	11	30
24	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan LPK Amanah Mandiri Internasional	26/03/2024 s.d. 03/04/2024	30	21	9	30
25	Pelatihan Dasar AMDAL kerjasama dengan IPB Training	22/04/2024 s.d. 27/04/2024	16	5	11	16
26	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan PSLH ITB	08/07/2024 s.d. 12/07/2024	29	10	19	29
27	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan PSLH ITB	19/08/2024 s.d. 23/08/2024	29	10	19	29
28	Pelatihan Dasar Amdal Kerjasama dengan PSLH ITB	02/09/2024 s.d. 06/09/2024	20	13	7	20
29	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat	22/10/2024 s.d. 24/10/2024	40	40	0	40



No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
	Peduli Api Berkesadaran Hukum					
Jumlah			926	568	358	926

\*Keterangan : Lk = Laki – laki, Pr = Perempuan

Tabel 17. Realisasi Pelatihan SDM Non Aparatur LHK di Balai Pelatihan LHK Tahun 2024

No.	BPLHK	Peserta	
		Target	Realisasi
1	BPLHK Kadipaten	200	201
2	BPLHK Bogor	200	200
3	BPLHK Pekanbaru	204	204
4	BPLHK Samarinda	447	447
5	BPLHK Pematang Siantar	160	160
6	BPLHK Makassar	120	120
7	BPLHK Kupang	249	249
Jumlah		1580	1581

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi pelatihan SDM non aparatur yang diselenggarakan di Pusat Diklat SDM LHK dan 7 (tujuh) Balai Pelatihan LHK dengan jumlah 2.057 orang dari target sebesar 2.056 orang lulusan. Persentase capaian Lulusan Diklat Non Aparatur LHK sebesar 100,04%. Terdapat penambahan jumlah peserta pelatihan pada BPLHK Kadipaten sebanyak 1 orang dari target 30 orang sehingga menjadi 31 orang. Penambahan jumlah peserta pada Pelatihan Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) berdasarkan usulan permohonan peserta pelatihannya sebanyak 31 orang yang merupakan binaan dari PT Pertamina EP Regional 2.

**Efisiensi** capaian kinerja untuk Lulusan Diklat Non Aparatur LHK tahun 2024 berdasarkan persentase realisasi anggaran sebesar 94,06% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,45% diperoleh rasio efisiensi yaitu 0,94 yang dikategorikan efisien. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran tahun 2024 telah dapat memenuhi

pelaksanaan kegiatan pelatihan non aparatur LHK setelah adanya intervensi mekanisme anggaran pelatihan kerjasama.

Selanjutnya melihat pengukuran **efektivitas** capaian kinerja tahun 2024 untuk lulusan diklat non aparatur LHK termasuk kategori tidak efektif yaitu 1,00. Efektivitas capaian dinyatakan tidak efektif walaupun bernilai 1,00 dikarenakan presentase capaian kinerja tahun 2023 memiliki selisih 0,41% lebih besar dibanding presentasi capaian kinerja tahun 2024. Dalam hal ini dinilai bahwa capaian kinerja tahun 2024 tidak efektif dibanding tahun 2023.

Untuk progress capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 99,02%. Target renstra tahun 2020-2024 dengan jumlah 15.150 orang telah terealisasi sebanyak 15.002 orang lulusan. Sisa pencapaian target renstra untuk tahun 2024 adalah sebesar 0,98% atau hanya kurang 148 orang lulusan peserta yang diperlukan untuk mencapai target 100%.

**Kendala** yang dihadapi pada pelatihan non aparatur LHK yaitu kurangnya koordinasi mengenai sinkronisasi data jumlah pelatihan non aparatur LHK pada satker lingkup BP2SDM yang menyebabkan optimalisasi sisa pencapaian target renstra tahun 2020-2024 yang hanya kurang dari 10% pada tahun 2024 tidak bisa terpenuhi. **Rekomendasi** untuk pelaksanaan IKK lulusan diklat non Aparatur LHK untuk renstra 2025-2029 adalah perlunya perencanaan jumlah pelatihan non aparatur yang lebih spesifik, terukur, relevan sehingga dapat tercapai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja dan rencana strategis Pusat Diklat SDM LHK.

**Output** dari indikator kinerja kegiatan yaitu tercapainya jumlah SDM LHK yang lulus dalam pelatihan non Aparatur LHK. **Outcome** yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan lulusan dari pelatihan yang diikuti sehingga dapat terampil dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan tugas di bidang LHK.

### **3. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha**

Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha merupakan peningkatan kapasitas SDM Non Aparatur LHK sehingga mampu beradaptasi dan berdaya dalam dunia kerja sektor LHK. Pada awalnya pelatihan ini diprioritaskan bagi alumni SMK Kehutanan namun dikarenakan KLHK tidak termasuk Kementerian/Lembaga pengampu program kartu prakerja maka pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha ditujukan untuk Non Aparatur LHK.

Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 oleh Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

No.	Nama Pelatihan	Waktu (Hari)	Peserta Pelatihan (orang)			
			Target	Realisasi		
				Lk	Pr	Jml
1	Bimbingan Teknis Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) bagi Masyarakat Angkatan I	12/06/2024 s.d. 12/06/2024	40	33	7	40
2	Bimbingan Teknis Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) bagi Masyarakat Angkatan II	12/06/2024 s.d. 12/06/2024	40	39	1	40
3	Bimbingan Teknis Agroforestri bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun	20/07/2024 s.d. 20/07/2024	80	19	61	80
4	Bimbingan teknis pengelolaan sampah organik untuk budidaya Maggot BSF di Jombang	28/07/2024 s.d. 28/07/2024	80	62	18	80
5	Pengelolaan Sampah untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) Angkatan I	06/09/2024 s.d. 06/09/2024	40	21	19	40
6	Pengelolaan Sampah untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) Angkatan II	06/09/2024 s.d. 06/09/2024	40	31	9	40
Jumlah			320	205	115	320

\*Keterangan : Lk = Laki – laki, Pr = Perempuan

Tabel 19. Realisasi Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha di Balai Pelatihan LHK Tahun 2024

No.	BPLHK	Jumlah (orang)	
		Target	Realisasi
1	BPLHK Kadipaten	1.040	1.040

No.	BPLHK	Jumlah (orang)	
		Target	Realisasi
2	BPLHK Bogor	1.060	1.060
3	BPLHK Pekanbaru	1.080	1.080
4	BPLHK Samarinda	1.091	1.091
5	BPLHK Pematang Siantar	1.120	1.120
6	BPLHK Makassar	1.080	1.080
7	BPLHK Kupang	1.080	1.080
Jumlah		7.551	7.551

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha tahun 2024 yang diselenggarakan di Pusat Diklat SDM LHK dan 7 (tujuh) Balai Pelatihan LHK dengan jumlah 7.871 orang dari target sebesar 7.871 orang lulusan. Persentase capaian Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha sebesar 100%.

Efisiensi capaian kinerja untuk Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha tahun 2024 berdasarkan persentase realisasi anggaran sebesar 96,61% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% diperoleh rasio efisiensi yaitu 0,97 yang dikategorikan efisien.

Berdasarkan pengukuran **efektivitas** capaian kinerja tahun 2024 untuk Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha termasuk kategori efektif yaitu 1,00. Hasil ini diperoleh dengan membandingkan presentase capaian kinerja tahun 2024 dan 2023.

Pada tahun 2024, **tidak terdapat kendala** yang berarti dalam IKK Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha bahkan pencapaian kinerja yang dihasilkan tertinggi dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Pembiayaan pelatihan yang berasal dari APBN ditambah dari intervensi pelatihan kerjasama yang berasal Eselon I lingkup KLHK.

Pada akhir tahun renstra 2020-2024, progress capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 hanya 30,73%. Target renstra tahun 2020-2024 untuk Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha dengan jumlah 35.000 orang dan direalisasikan sebanyak 10.756 orang lulusan. Ketidakberhasilan pencapaian target renstra tahun 2020-2024 tidak bisa dipungkiri dikarenakan terlalu besarnya target yang ditetapkan yaitu sebesar 35.000 orang. Adanya target sebesar 35.000 orang dalam rangka dukungan bagi program pemberian kartu prakerja yang ditetapkan oleh

Pemerintah, namun dalam implementasinya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kartu prakerja yang mana KLHK tidak termasuk di dalamnya sehingga dukungan anggaran tidak dapat teralokasikan sebagaimana mestinya.

**Rekomendasi** yang diharapkan pada tahun rencana strategis 2025-2029 adalah perencanaan jumlah pelatihan yang lebih spesifik, terukur disesuaikan dengan rencana jumlah kelulusan peserta didik SMK Kehutanan selama jangka waktu 5 tahun ke depan dengan kepastian anggaran yang telah diselenggarakan.

**Output** dari indikator kinerja kegiatan yaitu terwujudnya jumlah SDM yang lulus pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha. **Outcome** yang dihasilkan dari IKK ini yaitu meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan lulusan dari pelatihan yang diikuti sehingga dapat terampil dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada bidang LHK.

#### **4. Lulusan Pendidikan Karyasiswa**

Pendidikan lanjutan bagi S2 dan S3 merupakan kebijakan dari Kementerian LHK untuk meningkatkan profesionalisme bagi aparatur SDM KLHK. Maksud dilaksanakannya kegiatan pendidikan S2 dan S3 untuk menghasilkan aparatur yang memiliki kapasitas peningkatan kompetensi dalam mengemban tugasnya di KLHK.

Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai implementasi dalam meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kehutanan. Untuk mencapai hal di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pengelolaan pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur Lingkungan Hidup dan kehutanan di perguruan tinggi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Pasca Sarjana.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi Pendidikan Program Pasca Sarjana S2 dan S3 bagi pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibiayai dari anggaran Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruhnya untuk pendidikan dalam negeri dengan target lulusan karyasiswa pada Tahun 2024 sebanyak 10 orang (S2) dan 1 orang (S3). Output kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan & kemampuan pegawai Kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan karyasiswa S2 dan S3. Dari pengukuran capaian kinerja dihasilkan persentase capaian kinerja IKK lulusan pendidikan karyasiswa adalah 110%, yang mana realisasi capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Selanjutnya dilihat dari nilai efisiensi capaian kinerja yaitu 0,90 (dikategorikan efisien), dengan realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 yang sama yaitu 100%.

Capaian kinerja kegiatan Pusat Diklat SDM LHK yang Lulus Pendidikan karyasiswa S2 dan S3 pada tahun 2024 adalah 10 orang lulusan karyasiswa S2 (2 orang laki-laki dan

8 orang perempuan) dan 1 orang lulusan karyasiswa S3 (1 orang laki-laki). Untuk efektifitas capaian kinerja lulusan pendidikan karyasiswa S2 dan S3 pada tahun 2024 sebesar 1,10 (efektif). Hasil pengukuran efektifitas capaian kinerja diperoleh karena terjadi peningkatan persentase capaian kinerja tahun 2024 yaitu 110% dibandingkan persentase capaian kinerja lulusan Pendidikan karyasiswa tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2024, kendala yang dihadapi secara teknis tidak ditemukan namun capaian progress renstra tahun 2020 – 2024 tidak dapat terpenuhi. Dari target renstra yang ditetapkan sebanyak 225 orang, capaian kinerja yang dihasilkan sampai dengan tahun 2024 hanya sejumlah 88 orang. Berdasarkan persentase capaian progress renstra yang diperoleh adalah 34,22%. Capaian progress renstra untuk IKK lulusan pendidikan karyasiswa ini merupakan yang kedua terendah dibandingkan 5 IKK lainnya. Hal tersebut dikarenakan pencapaian kinerja pada renstra tahun 2020-2024 hanya menggunakan sumber dana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. anggaran Pusat Diklat SDM LHK. Belum selarasnya sumber dana KLHK yang dianggarkan untuk mendukung pemenuhan lulusan Pendidikan karyasiswa menjadi faktor penting yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja pada renstra tahun 2020-2024 ini.



Gambar 10. Pelaksanaan Presentasi Hasil Studi Karyasiswa Program Doktor (S3) Tahun 2024

**Upaya tindak lanjut** yang bisa dijadikan pembelajaran dari target renstra sebelumnya yaitu penyalarsan PAGU anggaran yang bisa disediakan oleh Kementerian LHK pada renstra tahun 2025-2029 sehingga target IKK lulusan Pendidikan karyasiswa bisa menyesuaikan dan dapat direalisasikan setiap tahun berjalan. Selain itu peningkatan jejaring dengan para pihak (*stakeholder*) terutama dari lembaga penyedia beasiswa

dalam dan luar negeri yang dapat menjadi sponsor atau pemberi beasiswa seperti dana Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), LPDP Kementerian Keuangan, Dana Mandiri dan Beasiswa dari donor/sponsor lainnya bisa terus dikembangkan sehingga Pusat Diklat SDM LHK dapat menjadi pusat informasi beasiswa bagi SDM Kementerian LHK yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya juga lulusan Pendidikan karyasiswa yang berasal dari dana beasiswa sponsor bisa dimasukkan/diintervensi melalui Kerjasama (MOU) yang dilakukan oleh Kementerian LHK dengan pihak sponsor sehingga bisa dimasukkan ke dalam IKK lulusan Pendidikan karyasiswa.

Adapun **output** dari indikator kinerja kegiatan yaitu terwujudnya jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa (S2 dan S3) sesuai target. **Outcome** yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya pegawai Kementerian LHK yang meningkat kompetensi SDM-nya dalam melaksanakan tugas dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 guna mendukung pembangunan LHK.

## 5. Nilai KHDTK yang Dikelola

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018, pengertian Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Pengelolaan KHDTK merupakan sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya.

Pengelolaan KHDTK yang dilakukan oleh Pusat Diklat SDM LHK adalah KHDTK Diklat Kehutanan. KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.

Kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan telah dilakukan menggunakan Kriteria dan Indikator Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.6/P2SDM/SET.11/DIK.0/12/2022. Setiap Balai Pelatihan LHK melakukan *self assessment* untuk mengukur kesesuaian efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan menggunakan kriteria dan indikator pengelolaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Pusat Diklat SDM LHK melakukan penjaminan kualitas terhadap *self assessment* tersebut. Penilaian pengelolaan KHDTK-HD sebagaimana tabel 19 berikut ini:

Tabel 20. Kriteria dan Indikator Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan

Kriteria	Indikator	Bobot
1.	2. Penataan Areal	
	3. Penyusunan rencana pengelolaan	
2. Pelaksanaan Kegiatan KHDTK	1. Tingkat Efektivitas Organisasi Pengelola	30%
	2. Tingkat Kelayakan SDM Pengelola	
	3. Pelaksanaan Diklat teknis dan/ atau Diklat fungsional kehutanan di KHDTKDiklat Kehutanan	
	4. Melakukan pemeliharaan batas areal KHDTK Diklat Kehutanan	
	5. Melakukan kegiatan rehabilitasi hutan	
	6. Melakukan kegiatan Konservasi Tanah dan Air (KTA)	
	7. Melakukan Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati	
	8. Melakukan Perlindungan dan Keamanan Hutan	
3. Kerjasama pengelolaan KHDTK	1. Terdapat dokumen perjanjian kerja sama antara kedua pihak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10%
	2. Terdapat rencana bersama antar para pihak	
	3. Pelaksanaan Kerja sama berjalan sesuai dengan dokumen kerjasama dan reneana kerja	
4. Pemanfaatan hutan pada areal KHDTK	1. Pemanfaatan kawasan (khusus hutan produksi)	30%
	2. Pemungutan hasil hutan bukan kayu	
	3. Pemanfaatan jasa lingkungan dari wisata alam	
	4. Pemberdayaan masyarakat	
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung KHDTK	1. Terdapat rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung KHDTK	10%
	2. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung KHDTK	
	3. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung KHDTK	
6. Pelaporan Pengelolaan KHDTK	1. Penyusunan laporan tepat waktu dan sesuai format penyusunan laporan	5%
	2. Isi laporan pengelolaan KHDTK sesuai fakta	

Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan/efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan serta mengetahui perkembangan pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan. Berikut tabel Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dari 7 (tujuh) KHDTK Diklat Kehutanan lingkup Badan P2SDM Tahun 2024 :



Tabel 21. Hasil Indeks Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan lingkup Badan P2SDM Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Nama KHDTK	Nilai Total Indeks Pengelolaan
1.	BPLHK Kadipaten	Sawala Mandapa	82,58
2.	BPLHK Pematangsiantar	Pondok Buluh	80,75
3.	BPLHK Pekanbaru	Bukit Suligi	77,33
4.	BPLHK Kupang	Sisimeni Sanam	79,92
5.	BPLHK Samarinda	Loa Haur	60,67
6.	BPLHK Makassar	Tabo-Tabo	70,08
7.	BPLHK Rumpin Bogor	Rumpin	75,50
Rata – rata Nilai Total Indeks Pengelolaan			<b>75,26</b>

Dari hasil penilaian diperoleh indeks nilai KHDTK yang dikelola Tahun 2024 adalah sebesar 75,26 poin dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 70 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 108,04%. Nilai tersebut telah menggambarkan bahwa pengelolaan KHDTK/ Diklat Kehutanan lingkup Badan P2SDM telah berjalan dan sesuai dengan rencana pengelolaan dan memenuhi indikator-indikator tercapainya pengelolaan KHDTK. Berdasarkan pengukuran efisiensi kinerja Tahun 2024 diperoleh hasil yaitu 0,80 (efisien). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran yang tersedia tahun 2024 untuk penilaian indeks KHDTK Diklat Kehutanan telah digunakan sesuai dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Terdapat upaya efisiensi dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yakni dengan melakukan monitoring dua kali dalam setahun melalui rangkaian penilaian mandiri (*self assessment*), validasi dokumen lapangan secara komprehensif.

Kemudian pengukuran **efektivitas** capaian kinerja yang membandingkan persentase kinerja tahun 2024 (107,51%) dengan persentase kinerja tahun 2023 (108,04%) diperoleh nilai efektivitas 1,00 dan dikategorikan tidak efektif dikarenakan capaian kinerja tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2024.

Penilaian efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan mulai dilaksanakan dari tahun 2022 yang menjadi *turning point* sebagai landasan dan pertimbangan dalam penilaian indeks pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan. Pada tahap pertama akan dilakukan Pengendalian mandiri (*Self Assesment*) oleh Pengelola KHDTK/BPLHK/Perguruan Tinggi. Pelaksanaan monitoring/penilaian pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan (Perkabadan No.6 Tahun 2022 pasal 9 ayat 3). Selanjutnya dilakukan Monitoring oleh Kepala Badan P2SDM melalui Tim Penilai Indeks KHDTK Diklat Kehutanan. Selanjutnya dilakukan Verifikasi Dokumen Pendukung Hasil Pengendalian Mandiri (*self assesment*) oleh Tim Penilai Indeks KHDTK Diklat Kehutanan.

Pada awal pertama penilaian pada tahun 2022, telah dilaksanakan dalam kurun waktu setiap triwulan dari pertengahan tahun 2022. *Self assesment* telah dilakukan tetapi belum dilaksanakan verifikasi dan penyampaian dokumen pendukung. Kemudian

pada tahun 2023 dilaksanakan setiap semester dengan menyampaikan dokumen pendukung dari setiap kriteria dan indikator yang dilanjutkan dengan verifikasi untuk kesesuaian pengukuran efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan. Dari hasil analisa, pencermatan dokumen dan monitoring lapangan terdapat *self assessment* dari beberapa Balai Pelatihan LHK yang dinilai terlalu tinggi. Terdapat KHDTK Diklat Kehutanan yang tidak memiliki bukti dokumen pendukung yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan sehingga nilai *self assessment*-nya disesuaikan dan dapat divalidasi oleh Tim Penilai Indeks KHDTK Diklat Kehutanan.

Pada tahun 2024, penilaian efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan terus disempurnakan pelaksanaannya secara lebih optimal oleh Tim Penilai Indeks KHDTK Diklat. Hasil yang telah dicapai pada tahun tersebut masih terdapat beberapa KHDTK yang penyampaian dokumentasi kegiatannya belum sesuai dengan yang tertuang pada peraturan Kepala BP2SDM No. 6 Tahun 2022. Tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu dilakukan monitoring untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola agar meningkatkan indeks efektivitas dari setiap kegiatan dan arah pengelolaan KHDTK dapat terdokumentasi pelaporan yang sesuai dengan aturan. Nilai yang didapat mendapatkan ketercapaian target tetapi masih ada 1 Unit KHDTK yang dibawah target karena dokumen pendukung dan telah dilaksanakan monitoring tetapi belum sesuai.

Capaian kinerja untuk nilai KHDTK yang dikelola dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah 107,51%. Progress capaian renstra tahun 2020-2024 yang menargetkan nilai indeks 70 poin dari 7 unit KHDTK Diklat Kehutanan telah melebihi dengan perolehan nilai sebesar 75,26. Faktor pendukung tercapainya kegiatan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yaitu :

- a) Optimalisasi sinergitas pengelolaan KHDTK antara Balai Pelatihan LHK dengan SMK Kehutanan Negeri dalam rangka keterpaduan antara pendidikan, pelatihan dan sertifikasi serta implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar, yang dilakukan melalui:
  - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada KHDTK seperti ruang asrama, perbaikan akses jalan, pembuatan dermaga, renovasi persemaian, dan sebagainya untuk mengoptimalkan penggunaan KHDTK sebagai sarana kegiatan praktik siswa SMK Kehutanan Negeri.
  - Optimalisasi kegiatan praktik siswa SMK Kehutanan Negeri dalam kegiatan pengelolaan seperti inventarissi hutan, pemeliharaan batas, rehabilitasi dan lainnya.
- b) Pemanfaatan KHDTK Diklat Kehutanan agar dapat dipergunakan oleh institusi pendidikan lainnya (Universitas, SMA/SMK, SMP dan SD) dan mitra kerja pemerintah maupun swasta sehingga dapat lebih termanfaatkan dalam rangka pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang berkelanjutan.
- c) Menginisiasi upaya kerjasama dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dimulai perencanaan, perlindungan, dan lainnya dengan institusi maupun para pihak yang terkait. Sebagai contoh: kegiatan pengamanan dan penegakan hukum dapat

bersinergi dengan Balai Gakkum, untuk penataan dan pemeliharaan batas kawasan dapat bekerjasama dengan BPKHTL.

Pada tahun 2024, pelaksanaan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan masih terdapat **kendala** diantaranya yaitu masih terdapat kebijakan yang tidak selaras yang terjadi pada kawasan KHDTK Diklat Kehutanan yang masih tumpang tindih peruntukannya seperti *sultan ground*, TORA, peta sawit, dll. Selain itu masih terbatasnya anggaran pengelola KHDTK sehingga dalam pengelolaannya belum dapat dioptimalkan. Selanjutnya beberapa KHDTK memiliki luasan yang cukup besar karena telah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Menteri LHK P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018. Terjadinya dinamika pergantian personal pengelola KHDTK menyebabkan rendahnya pemahaman regulasi/kebijakan terkait KHDTK Diklat Kehutanan. Pengelola KHDTK Diklat Kehutanan belum sepenuhnya melakukan tata batas dan menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) sesuai ketentuan (diberikan batas waktu 1 Tahun dari SK ditetapkan). Terakhir, masih belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara pengelola KHDTK.

Upaya **tindak lanjut** untuk indikator kinerja kegiatan Nilai KHDTK yang dikelola yaitu melakukan pembinaan secara intensif pada beberapa KHDTK Diklat Kehutanan untuk mencapai nilai pengelolaan seperti yang ditargetkan. Selanjutnya upaya peningkatan kemantapan kawasan melalui pemeliharaan batas kawasan, patroli, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi serta pengembangan kemitraan.

Pada tahun 2023 sebelumnya telah terdapat upaya tindak lanjut untuk penyamaan persepsi paradigma pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 telah dilakukan Seminar Nasional Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Kemudian pada tahun 2024, Pusat Diklat SDM LHK melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan Pelatihan Kehutanan Tahun 2024.

Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Mei 2024 di Kertajati Majalengka, dengan tema "Menuju Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang Efektif" diikuti oleh 107 peserta dari 38 pengelola KHDTK Diklat Kehutanan dan 28 Instansi bukan pengelola KHDTK. Adapun rumusan hasil seminar sebagai berikut:

- Mengembalikan perspektif pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan sesuai dengan Pasal 55 UU 41 Tahun 1999 dan operasional pengelolaan sesuai dengan Permen LHK No 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Mereview substansi kebijakan terkait pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang akan dilakukan oleh BP2SDM sebagai pembina.
- Memprioritaskan penyelesaian tata batas areal kerja KHDTK Diklat Kehutanan dengan dukungan dari PKTL.

- Pemasalahan administrasi, tata kelola, dan ataupun teknis pengelolaan seperti, luasan KHDTK Diklat Kehutanan, perubahan kebijakan tata ruang yang berkaitan dengan KHDTK Diklat Kehutanan (TORA dan perubahan peruntukkan lainnya) harus diselesaikan dengan melibatkan BP2SDM.
- Evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan akan dilakukan oleh Ditjen PKTL berdasarkan hasil pembinaan dan pemantauan yang dilakukan oleh BP2SDM.
- Perlu meningkatkan intensitas pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan oleh BP2SDM.
- Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan harus melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya.
- Mengoptimalkan fungsi status kawasan KHDTK Diklat Kehutanan untuk kemandirian.
- Perlu dirumuskan rencana pengembangan SDM dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.
- Mendorong terbangunnya forum KHDTK Diklat Kehutanan
- Perlu disusun rencana aksi bersama dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan ke depan.



Gambar 11. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan Pelatihan Kehutanan Tahun 2024

**Rekomendasi** dalam rangka peningkatan kinerja nilai KHDTK yang dikelola adalah perlunya terus melakukan penyempurnaan implementasi dari pengukuran yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap penilaian Indeks KHDTK Diklat Kehutanan yang dikelola sehingga nilai indeks pengelolaan KHDTK diklat kehutanan dapat menggambarkan kondisi dan pengelolaan KHDTK sebenarnya di lapangan.

Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga, Swasta dan Masyarakat serta sinergitas dengan para pihak yang berpengaruh dan berkepentingan dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan. Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan harus bertumpu pada tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM LHK sesuai dengan amanat dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**Output** dari indikator kinerja kegiatan yaitu terwujudnya jumlah SDM LHK yang lulus pelatihan non Aparatur LHK. **Outcome** yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kinerja pegawai Kementerian LHK yang meningkat kompetensi melalui pelatihan guna mendukung tercapainya tujuan organisasi Kementerian LHK. Berikut ini salah satu *success story* terkait Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Kehutanan Sisimani Sanam yang dapat dijadikan sebagai *sharing learning* bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Hutan.

---



---

### **Success Story**

**PENGLOLAAN KHDTK DIKLAT KEHUTANAN**

---

**SISIMANI SANAM**

---

Kisah sukses kali ini berasal dari KHDTK Diklat Kehutanan Sisimani Sanam yang berada di dalam pengelolaan BPLHK Kupang



KTH Paloil Tob merupakan salah satu dari 5 KTH Binaan BPLHK Kupang. Melalui hasil pendampingan yang intensif, KTH Paloil Tob menghasilkan kacang mete dari pohon jambu mete yang ditanam pada lahan kemitraan seluas 33,77 Hektar pada KHDTK Diklat Kehutanan Sisimani Sanam. Dari tahun 2020-2024 dari produksi kacang Mete ini telah didapatkan omset penjualan sebesar **Rp 407.604.200,-** dan telah dipasarkan di wilayah Kupang, Labuan Bajo hingga ke Pulau Jawa



**Pemasaran :**

- ✓ **7 Swalayan di Kota Kupang**
- ✓ **2 Toko oleh2 di Labuan Bajo**
- ✓ **Pemasaran grosir ke Jawa**



Tahun	Estimasi Pendapatan sebelum pelatihan/pendampingan		Pendapatan setelah pelatihan/pendampingan	
	Gelondongan (kg)	Nilai Gelondongan Rp. 12.000/kg	Grade Campur Kacang Mete (kg)	Pendapatan Kacang Mete (Rp)
2020	2.424,12	29.089.440	606,03	89.819.200
2021	2.296,00	27.552.000	574,00	85.420.000
2022	1.931,20	23.174.400	482,80	72.463.000
2023	2.255,00	27.060.000	563,75	83.700.000
2024	2.053,00	24.636.000	513,25	76.202.000
<b>Jumlah</b>	<b>10.959,32</b>	<b>131.511.840</b>	<b>2.739,83</b>	<b>407.604.200</b>

## 6. Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat

Penyelenggaraan Pendidikan SMK Kehutanan Negeri merupakan salah satu kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri LHK Nomor

P.42/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri menyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) bertujuan untuk menyediakan tenaga teknis menengah kehutanan yang sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, responsif, demokratis dan menjadi motor penggerak Pembangunan kehutanan di lapangan dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, lulusan SMK Kehutanan diberikan materi pembelajaran di kelas, praktik lapang dan magang sedemikian rupa sehingga memiliki kompetensi dan daya saing agar siap mengisi kebutuhan tenaga kerja di tingkat tapak.

Pada tahun 2024, IKK Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat adalah sebanyak 487 siswa SMK Kehutanan Negeri dari target 491 siswa, mencapai tingkat kelulusan sebesar 99,18%. Meskipun capaian ini cukup tinggi, terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023, di mana tingkat kelulusan mencapai 100,00% dengan seluruh siswa yang memenuhi persyaratan kelulusan. Penurunan ini disebabkan oleh adanya 4 siswa dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan pada tahun 2024. Berdasarkan jenis kelamin, sebaran lulusan laki-laki mendominasi dengan total sebanyak 364 orang (74,74%) dibandingkan dengan lulusan perempuan sebanyak 121 orang (25,26%). Dominasi proporsi laki-laki ini juga disebabkan faktor sarana prasarana yang tersedia terutama asrama.

Terdapat empat paket kompetensi utama di SMK Kehutanan Negeri. Paket kompetensi dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan spesifik guna memenuhi berbagai aspek kebutuhan SDM bidang kehutanan. Adapun paket kompetensi tersebut meliputi:

- a. Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH): Kompetensi Penguji dan Pengukur Kayu Bundar
- b. Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH): Kompetensi Pembuatan Peta hasil Pengolahan GPS
- c. Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH): Kompetensi Pembuat bibit generatif
- d. Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSH): Kompetensi Pemanduan Wisata Alam

Tabel 22. Sebaran Lulusan SMK Kehutanan Negeri Berdasarkan Paket Kompetensi Keahlian Tahun 2024

SMKKN	TIPH	TRRH	TPHH	TKSDA	Total (orang)
Pekanbaru	25	35	33	0	103
Kadipaten	25	25	26	26	102
Samarinda	35	0	67	0	102
Makassar	0	34	34	33	101
Manokwari	52	0	0	27	79

	147	94	160	86	487
--	-----	----	-----	----	-----

Tahun 2024, Persentase capaian kinerja IKK Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat adalah 99,19% dengan realisasi capaian sebanyak 487 orang dari target sebanyak 491 orang lulusan. Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian kinerja diperoleh rasio efisiensi sebesar 0,64 sehingga dapat dikategorikan paling efisien diantara 6 (enam) IKK yang ada.

Efektivitas capaian kinerja IKK Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat tahun 2024 memperoleh nilai 0,99. Capaian kinerja tahun 2024 berkurang jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 senilai 0,81%.

Capaian progress renstra tahun 2020-204 telah menghasilkan presentase sebesar 100,13% dengan capaian kinerja sebanyak 2.371 orang dari target Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 2.368 orang.

Faktor – faktor pendukung capaian kinerja IKK Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat adalah secara umum dikarenakan bertambahnya minat para lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMK Kehutanan Negeri lingkup KLHK sehingga PPDB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama renstra tahun 2020-2024. Selanjutnya kontinuitas pembinaan teknis terhadap 5 SMK Kehutanan Negeri dan 32 SMK yang memiliki jurusan kehutanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi supervisi dan monitoring, webinar pengembangan kapasitas guru, pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, kegiatan pembelajaran, kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri di bidang kehutanan serta sertifikasi kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada tahun 2024, Pusat Diklat SDM LHK telah menyelenggarakan beberapa kegiatan pembinaan yaitu :

1. Workshop Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan output SK Kepala BP2SDM tentang pengurus MKKS Periode 2024-2027
2. Workshop Pembinaan Teknis SMKK yang terdapat tindak lanjut yaitu proses MoU BP2SDM dengan APHI
3. Pelatihan Pengelolaan Sampah, peserta adalah Guru SMKK
4. Pelatihan Asesor Kompetensi & RCC dengan peserta yang berasal dari Asesor LSP Pusklat SDM LHK
5. *Community of Practice Guru* yang dilaksanakan rutin setiap bulan dengan tema yang beragam
6. Fasilitasi Uji Kompetensi Siswa SMKK (sertifikat BNSP) yang diperoleh 8 skema uji kompetensi
7. Pengumpulan Data 37 SMKK (output : satu data SMKK)

Pada saat ini terdapat beberapa isu penting yang menjadi *concern* dalam kegiatan yang terkait dengan kegiatan Pendidikan Menengah ini yaitu : Profil distribusi lulusan SMK Kehutanan, yang mana diperoleh hasil bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, jumlah lulusan SMKKN yang tidak terserap semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan persentase lulusan SMKKN yang tidak bekerja meningkat setiap tahun. Salah satu faktor penyebab tidak terserapnya lulusan SMKKN adalah berkurangnya formasi CPNS dari lulusan SMA/SMK. Sementara itu untuk kebutuhan tenaga jabatan fungsional Pemula (lulusan SMA/SMK/Sederajat) masih banyak dibutuhkan di Tingkat tapak.

Hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan saat ini adalah rendahnya jumlah serapan alumni lulusan SMK Kehutanan sebagai tenaga lapangan siap kerja yang kompeten dan berdaya saing untuk bekerja di sektor kehutanan. Berdasarkan data serapan alumni pada tahun 2020-2022 bahwa hanya 18,3%, alumni yang bekerja di sektor kehutanan. 43,5% alumni masih belum bekerja dan 34% melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi sedangkan sisanya bekerja di luar sektor LHK.

**Upaya tindak lanjut** dari permasalahan ini adalah pelaksanaan magang lulusan SMK Kehutanan Negeri pada UPT lingkup KLHK sebagai tenaga terampil tingkat menengah di tingkat resort maupun pendamping Perhutanan Sosial. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 6 bulan sesuai dengan peminatan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa SMK Kehutanan tersebut. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki pengalaman lebih banyak dalam bekerja dan meningkatkan jejaring maupun peluang usaha siswa di tempat magang.

**Rekomendasi** untuk penyempurnaan IKK jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat adalah meningkatkan jejaring kerjasama antara Badan P2SDM dengan para pihak baik internal maupun eksternal KLHK seperti Direktorat Jenderal PSKL, KSDAE ataupun APHI yang dapat menyerap alumni lulusan SMK Kehutanan sebagai tenaga terampil menengah yang kompeten, bersertifikat dan berdaya saing. Selain itu perlu adanya upaya untuk menambah formasi CPNS dari lulusan SMA/SMK khususnya SMK Kehutanan.

**Output** dari indikator kinerja kegiatan yaitu tercapainya jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat. **Outcome** yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya peluang lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang bekerja sebagai tenaga terampil menengah yang kompeten, bersertifikat dan berdaya saing dalam dunia usaha dan dunia industri bidang teknis LHK.

## **7. Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu aspek kunci dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan ini bertujuan untuk



memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hadir sebagai serangkaian kegiatan, alat, dan prosedur yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. SAKIP melibatkan proses penetapan tujuan, pengukuran kinerja, pengumpulan dan pengelolaan data, pengklasifikasian, hingga pelaporan kinerja. Implementasi ini bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tetapi juga sebagai mekanisme untuk terus mendorong perbaikan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Evaluasi SAKIP dilakukan secara tahunan untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja di setiap instansi pemerintah. Sebagai panduan pelaksanaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam evaluasi SAKIP. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi SAKIP menilai empat komponen utama, yaitu:

- Perencanaan Kinerja (30%): Penekanan pada penyusunan rencana strategis dan indikator kinerja utama yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.
- Pengukuran Kinerja (30%): Fokus pada penggunaan indikator yang relevan, terukur, dan mampu menggambarkan capaian tujuan.
- Pelaporan Kinerja (15%): Penyusunan laporan kinerja yang akurat dan mencerminkan capaian program secara transparan.
- Evaluasi Internal (25%): Penilaian atas pelaksanaan program dan kebijakan melalui evaluasi mandiri untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan.

Pada tahun 2024, Pusat Diklat SDM LHK mendapatkan nilai SAKIP sebesar 83,81 poin dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja sebesar 80 poin dengan persentase capaian kinerja yaitu 104,76%. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil penjaminan mutu penilaian SAKIP Badan P2SDM pada tahun 2024. Hasil ini diperoleh setelah mendapatkan pengurangan nilai (-1) karena keterlambatan pengumpulan penilaian mandiri yang harus dilengkapi dalam aplikasi eSAKIP KLHK. Pusat Diklat SDM LHK mendapatkan predikat "A" (Memuaskan).

Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4 poin dari tahun 2023 yang memperoleh 79,81 poin dengan predikat "BB" atau Sangat Baik. Kemajuan ini dicapai melalui tindak lanjut yang menyeluruh atas seluruh rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK pada evaluasi tahun sebelumnya, bimbingan teknis yang diberikan oleh Tim Sekretariat Badan P2SDM serta optimalisasi penerapan evaluasi SAKIP melalui platform eSAKIP KLHK hingga ke tingkat satuan kerja (Satker). Keberhasilan ini menunjukkan komitmen organisasi Pusat Diklat SDM LHK untuk terus berbenah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

**Output** dari indikator kinerja ini yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pusat Diklat SDM LHK sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. **Outcome** yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah Pusat

Diklat SDM LHK dapat mempertanggungjawabkan dan menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi ke arah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di lingkup Kementerian LHK.

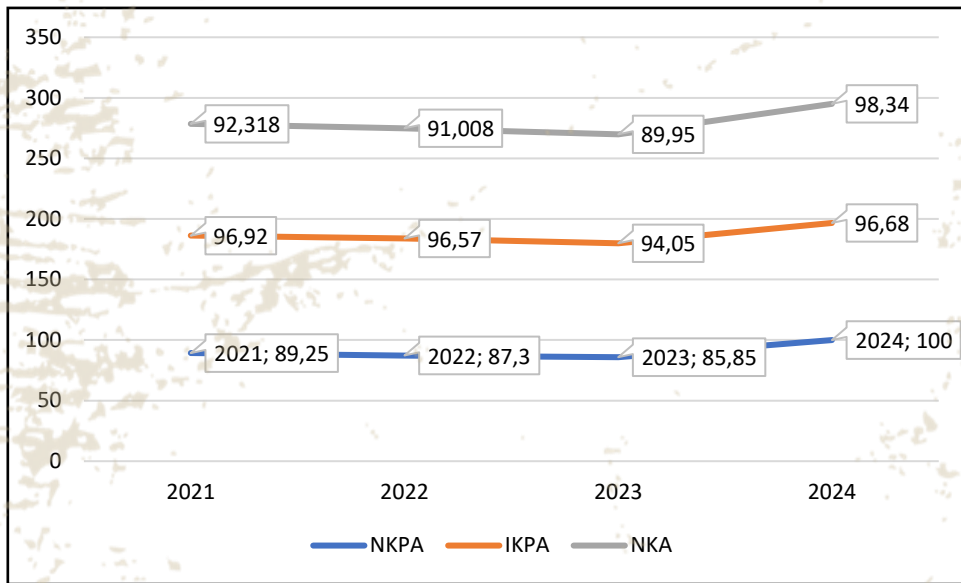
## 8. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kesesuaian perencanaan kinerja anggaran dan pelaksanaan kinerja anggaran. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana, menghasilkan output yang diharapkan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Nilai Kinerja Anggaran merupakan Indikator kinerja yang baru diterapkan pada tahun 2024 untuk seluruh unit kerja maupun satuan kerja di lingkup KLHK sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan sehingga Indikator tersebut pada saat ini hanya tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan pengungkitnya, NKA terdiri atas nilai capaian kinerja atas penggunaan Anggaran yang dilihat dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan bobot 50% yang dapat diperoleh dari aplikasi SMART dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50% yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN. Hal ini diatur dalam PMK nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran. Komponen NKPA terdiri dari Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Sedangkan komponen IKPA terdiri dari Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output dan Dispensasi SPM.

Pada Tahun 2024, Pusat Diklat SDM LHK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,34 poin dari target 82,5 poin yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sehingga presentase capaian kinerja sebesar 119,20%. capaian kinerja tersebut terdiri atas NKPA sebesar 100 poin dan IKPA sebesar 96,68 poin. Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang memperoleh nilai sebesar 89,95 poin.

**Output** dari indikator kinerja ini yaitu meningkatkan kesesuaian perencanaan kinerja anggaran dan pelaksanaan kinerja anggaran pada satker Pusat Diklat SDM LHK. **Outcome** yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah Pusat Diklat SDM LHK dapat menyesuaikan perencanaan kinerja anggaran dan pelaksanaan kinerja anggaran. sehingga anggaran digunakan sesuai rencana, menghasilkan output yang diharapkan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Berikut ini tabel grafik pengukuran NKPA, IKPA dan NKA Pusat Diklat SDM LHK tahun 2021-2024:

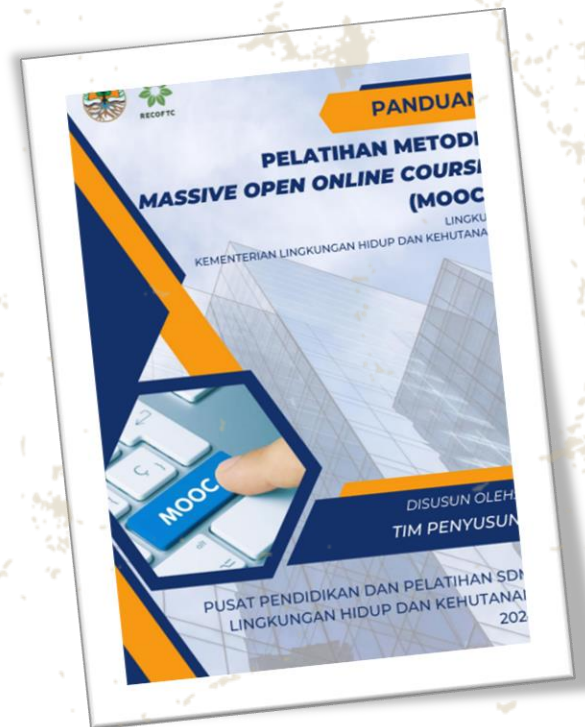


Gambar 12. Grafik pengukuran NKPA, IKPA dan NKA Pusat Diklat SDM LHK tahun 2021-2024

# INOVASI DAN PENGEMBANGAN PUSAT DIKLAT SDM LHK TAHUN 2024

Telah tersusunnya kurikulum baru untuk pelatihan metode MOOC juga telah disusun Panduan Pelatihan Metode MOOC yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam berbagai pelatihan metode MOOC yang lain pada satker lingkup BP2SDM. Pengembangan Pelatihan metode MOOC ini selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan menjadi salah satu Indikator Kinerja Kegiatan pada penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2024, Pusat Diklat SDM LHK telah menginisiasi pembentukan 5 (lima) KHDTK Diklat Kehutanan baru yaitu Hutan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan di Aceh, Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Negeri Malang, Hutan Pendidikan dan Latihan Tuwanwouwi di Papua Barat. Keberhasilan Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung pendirian sekaligus pengembangan KHDTK di seluruh wilayah Indonesia sebagai perwujudan dari peningkatan penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam berbasis Kawasan hutan.



## F. Realisasi Anggaran

### 1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 41.517.369.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.001.148.672,- atau sebesar 96,35%. Pelaksanaan Capaian Anggaran Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 29 berikut :

Tabel 23. Pelaksanaan Capaian Anggaran Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	16.742.405.000,-	16.731.658.055,-	99,94
	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	130.000.000,-	122.279.807,-	94,06
	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	610.000.000,-	589.338.073,-	96,61
	Lulusan Pendidikan Karya Siswa	1.745.850.000,-	1.732.783.527,-	99,25
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	300.000.000,-	259.098.762,-	86,37
Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten yang Kompeten dan Bersertifikat	2.719.934.000,-	1.719.125.627,-	63,20
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	18.249.180.000,-	18.236.900.421,-	99,93
	Layanan Umum	594.000.000,-	183.964.400,-	30,97
	Layanan BMN	6.000.000,-	6.000.000,-	100,00
EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	420.000.000,-	420.000.000	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>41.517.369.000,-</b>	<b>40.001.148.672,-</b>	<b>96,35</b>

## **2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil capaian kinerja kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM LHK serta penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan pada tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan. Hampir keseluruhan indikator kegiatan kinerja, capaian kinerjanya melebihi target yang diharapkan. Namun demikian, masih terdapat IKK yaitu jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat memperoleh capaian kinerja yaitu 487 orang dari target sebanyak 491 orang lulusan.

Permasalahan yang menjadi kendala pada kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM LHK terutama pada lulusan diklat aparatur LHK, lulusan diklat non aparatur LHK hampir pada setiap tahun renstra 2020 – 2024 adalah belum konsistennya data yang diberikan baik dalam jumlah pelatihan maupun peserta pelatihan yang diselenggarakan Pusat Diklat SDM LHK maupun Balai – Balai Pelatihan LHK.

Mencermati pada hasil progress renstra tahun 2020-2024 terdapat ketidaktercapaian terhadap target yang ditetapkan yaitu pada IKK Lulusan Diklat Non Aparatur LHK, Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha serta Lulusan Pendidikan Karyasiswa. Kendala yang terjadi pada IKK Lulusan Diklat Non Aparatur yakni kurangnya koordinasi mengenai sinkronisasi data jumlah pelatihan non aparatur LHK pada satker lingkup BP2SDM yang menyebabkan optimalisasi sisa pencapaian target renstra tahun 2020-2024 yang hanya kurang dari 10% pada tahun 2024 tidak bisa terpenuhi. Sementara itu, permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target renstra tahun 2020-2024 pada IKK Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha adalah terlalu besarnya target yang ditetapkan dikarenakan mengakomodir pelaksanaan program kartu prakerja melalui IKK Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha dengan target sebanyak 35.000 orang. Pada pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kartu prakerja dimana KLHK tidak termasuk di dalamnya sehingga dukungan anggaran tidak dapat teralokasikan sebagaimana mestinya. Permasalahan untuk Lulusan Pendidikan Karyasiswa, penghitungan jumlah lulusan hanya berasal dari sumber dana Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan cq Pusat Diklat SDM LHK saja yang tidak mendukung pencapaian kinerja sesuai target.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam renstra 2020-2024 berdasarkan IKP Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya adalah diperlukan perencanaan jumlah pelatihan yang lebih spesifik, terukur, relevan sehingga dapat tercapai dengan tenggat waktu yang selaras dengan PAGU anggaran yang tersedia dan ditetapkan dalam rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja dan rencana strategis selama 5 tahun ke depan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil pengukuran capaian kinerja indikator kinerja kegiatan berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari Lulusan Diklat Aparatur LHK, Lulusan Diklat Non Aparatur LHK, Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha, Lulusan Pendidikan Karyasiswa, Nilai KHDTK yang dikelola, Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, Nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK sebagai berikut:

1. Persentase rata – rata capaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK adalah 102,90%. Untuk capaian kinerja Nilai SAKIP adalah 104,76%. Sedangkan untuk Nilai Kerja Anggaran adalah 119,205. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja untuk meningkatkan kapasitas SDM LHK yang kompeten, professional dan berdaya saing telah sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran yang selaras dengan realisasi kegiatan.
2. Efisiensi rata – rata capaian kinerja adalah 0,94 yang dikategorikan efisien. Hal ini berarti realisasi anggaran tahun 2023 telah memenuhi capaian kinerja (fisik) yang telah dilakukan oleh Pusat Diklat SDM LHK.
3. Efektivitas rata – rata capaian kinerja adalah 1,01. Rasio efektivitas capaian kinerja dikategorikan efektif yang berarti capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.
4. Rata – Rata capaian progress renstra tahun 2020 -2024 adalah 87,75%. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja IKK pada renstra tahun 2020-2024 tidak terpenuhi.

#### **B. Saran dan Rekomendasi**

Saran dan rekomendasi dalam upaya peningkatan dan penyempurnaan berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun:

1. Optimalisasi pelatihan dengan metode *Massive Open Online Courses* (MOOC) untuk pelatihan bidang lingkungan Hidup Dan Kehutanan disamping metode *distance learning* dan *blended learning* dengan mempedomani Panduan Pelatihan Metode MOOC yang telah disusun oleh Pusat Diklat SDM LHK supaya efisiensi capaian kinerja lebih optimal untuk pencapaian target renstra 2025 -2029.
2. Penyelarasan PAGU anggaran yang bisa disediakan oleh Kementerian LHK pada renstra tahun 2025-2029 sehingga target IKK lulusan Pendidikan karyasiswa bisa menyesuaikan dan dapat direalisasikan setiap tahun berjalan.
3. Perlunya terus melakukan penyempurnaan implementasi dari pengukuran yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap penilaian Indeks KHDTK Diklat Kehutanan yang dikelola sehingga nilai indeks pengelolaan KHDTK diklat kehutanan dapat menggambarkan kondisi dan pengelolaan KHDTK sebenarnya di lapangan.

4. Perlunya meningkatkan jejaring kerjasama antara Badan P2SDM dengan para pihak baik internal maupun eksternal KLHK seperti Direktorat Jenderal PSKL, KSDAE ataupun APHI yang dapat menyerap alumni lulusan SMK Kehutanan sebagai tenaga terampil menengah yang kompeten, bersertifikat dan berdaya saing. Selain itu perlu adanya upaya untuk menambah formasi CPNS dari lulusan SMA/SMK khususnya SMK Kehutanan.



# LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024

Program/kegiatan	Klasifikasi Rincian Output(KRO)	Rincian Ouput (RO)	Satuan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Anggaran	Lokasi
029.08.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
6745-Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pengelolaan KHDTK	Layanan	Layanan Pengelolaan KHDTK	1 Layanan	259.132.000	- KHDTK Bukit Suligi, Riau - KHDTK Sawala, Majalengka (Jawa Barat) - KHDTK Loa Haur, Samarinda - KHDTK Tabo-tabo, Makassar - KHDTK Sisimisanam, Kupang - KHDTK Rumpin, Bogor - KHDTK Pondok Buluh, Pematang Siantar
				Blokir Perjalanan Dinas		40.868.000	-
	DCE- Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	Orang	Lulusan Diklat Aparatur LHK	3.659 Orang	16.736.105.000	- Pusat Diklat SDM LHK : 1.740 Orang - BPLHK Bogor : 60 Orang - BPLHK Kadipaten : 1.119 Orang - BPLHK Pematangsiantar : 60 Orang - BPLHK Pekanbaru : 140 Orang - BPLHK Samarinda : 186 Orang - BPLHK Makassar : 294 Orang - BPLHK Kupang : 60 Orang
				Blokir Perjalanan Dinas		6.300.000	-
	EBC-Layanan Manajemen Internal	Karyasiswa S2 dan S3 SDM LHK	Orang	SDM LHK yang lulus Pendidikan Karyasiswa	10 Orang	1.733.208.000	Pusat Diklat SDM LHK
				Blokir Perjalanan Dinas		12.642.000	
	SCE-Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	Orang	Jumlah SDM LHK ditingkat tapak yang Kompeten	2.506 orang	130.000.000	- Pusat Diklat SDM LHK : 926 Orang - BPLHK Bogor : 200 Orang - BPLHK Kadipaten : 200 Orang - BPLHK Pematangsiantar: 160 Orang - BPLHK Pekanbaru : 204 Orang - BPLHK Samarinda: 447 Orang - BPLHK Makassar: 120 Orang

Program/kegiatan	Klasifikasi Rincian Output(KRO)	Rincian Ouput (RO)	Satuan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Anggaran	Lokasi
							- BPLHK Kupang : 249 Orang - Pusat Diklat SDM LHK : 320 Orang - BPLHK Bogor : 1060 Orang - BPLHK Kadipaten : 1040 Orang - BPLHK Pematangsiantar : 1120 Orang - BPLHK Pekanbaru : 1080 Orang - BPLHK Samarinda : 1091 Orang - BPLHK Makassar : 1080 Orang - BPLHK Kupang : 1080 Orang
	SCE-Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	Orang	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	7.871 Orang	594.610.000	
				Blokir Perjalanan Dinas		15.390.000	-
6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan Negeri	Orang	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan Negeri	1 Layanan	1.719.934.000	- SMKKN Kadipaten - SMKKN Pekanbaru - SMKKN Makassar - SMKKN Samarinda - SMKKN Manokwari
				<i>Automatic Adjustment (AA)</i>		1.000.000.000	-
029.08.WA-Program Dukungan Manajemen							
5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Layanan	Terpenuhi Layanan umum pada satker Pusat Diklat SDM LHK	1 Layanan	190.000.000	Pusat Diklat SDM LHK
				<i>Automatic Adjustment (AA)</i>		410.000.000	
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	Terpenuhi layanan Perkantoran	1 layanan	18.249.180.000	Pusat Diklat SDM LHK
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan PraSarana Internal	Unit	Terpenuhi Layanan internal	1 unit	420.000.000	Pusat Diklat SDM LHK



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si.

**Jabatan** : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Drs. A. Palguna Ruteka

**Jabatan** : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2023

Pihak Kedua,

**Drs. A. Palguna Ruteka**  
19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,

**Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si.**  
NIP. 19670815 199203 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

No. (1)	Kegiatan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Kegiatan (4)	Target (5)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	4.335 orang*
2.			Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	1.240 orang*
3.			Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	7.840 orang*
4.			Lulusan Pendidikan Karya Siswa	10 Orang
5.			Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola
6.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten yang Kompeten dan Bersertifikat	491 orang**
<b>Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya</b>				
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	80 Poin
8.			Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK	97,25 Poin

**Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)**

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	4.335 orang*	26.242.405.000
SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	1.240 orang*	130.000.000
	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	7.840 orang*	610.000.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10 Orang	1.745.850.000
BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pengelolaan KHDTK	1 Layanan	300.000.000
BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	1 Layanan	2.719.934.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Layanan	16.434.180.000
	Layanan Umum	1 Layanan	600.000.000
EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	1 Paket	420.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>49.202.369.000</b>

Catatan : \* Total target termasuk yang dilaksanakan pada Balai Pelatihan LHK

\*\* Total target yang dilaksanakan pada SMKKN

Jakarta, 15 November 2023

**Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**



**Drs. A. Palguna Ruteka**  
NIP. 19650924 199303 1 001

**Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK**



**Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si.**  
NIP. 19670815 199203 2 002

**RENCANA AKSI TAHUN 2024  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Target Output Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	26.242.405.000	4.335*	Orang	-	90	250	775	1.025	1.175	1.405	1.535	1.665	2.565	3.435	4.335
	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	130.000.000	1.240*	Orang	-	280	440	520	670	860	1.080	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	610.000.000	7.840*	Orang	-	730	1.130	1.570	2.860	3.910	4.870	6.030	6.860	7.280	7.760	7.840
	Lulusan Pendidikan Karya Siswa	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	1.745.850.000	10	Orang	1	2	2	3	4	4	6	7	8	9	9	10
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	Layanan Pengelolaan KHDTK	300.000.000	70	Poin	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten yang Bersertifikat	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	2.719.934.000	491**	Orang	-	-	-	-	-	491	491	491	491	491	491	491
<b>Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya</b>																	
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	Layanan Umum	600.000.000	80	Poin	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK			97,25	Poin	-	-	40	50	60	70	75	80	85	90	95	97,25

Catatan : \* Total target termasuk yang dilaksanakan pada Balai Pelatihan LHK

\*\* Total target yang dilaksanakan pada SMKKN

Jakarta, 15 November 2023  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK

Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si.  
NIP. 19670815 199203 2 002



## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si.

**Jabatan** : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Drs. A. Palguna Ruteka

**Jabatan** : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Desember 2024

Pihak Kedua,

Drs. A. Palguna Ruteka  
19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,

  
Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si.  
NIP. 19670815 199203 2 002

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

No. (1)	Kegiatan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Kegiatan (4)	Target Semula (5)	Target Menjadi (6)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	3.253 orang*	3.659 orang*
2.			Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	2.373 orang*	2.506 orang*
3.			Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	7.860 orang*	7.871 orang*
4.			Lulusan Pendidikan Karya Siswa	10 Orang	10 Orang
5.			Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	70 poin (7 Unit)
6.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten yang Kompeten dan Bersertifikat	491 orang**	491 orang**
<b>Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya</b>					
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	80 Poin	80 Poin
8.			Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK	97,25 Poin	82,5 Poin

**Klasifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)**

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO Semula	Target RO Menjadi	Anggaran (Rp)
DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	3.253 orang*	3.659 orang*	16.742.405.000
SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	2.373 orang*	2.506 orang*	130.000.000
	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	7.860 orang*	7.871 orang*	610.000.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10 Orang	10 Orang	1.745.850.000
BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pengelolaan KHDTK	1 Layanan	1 Layanan	300.000.000
BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan	2.719.934.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	18.249.180.000
	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	594.000.000
	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	6.000.000
EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	1 Paket	1 Paket	420.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>41.517.369.000</b>

Catatan : \* Total target termasuk yang dilaksanakan pada Balai Pelatihan LHK  
\*\* Total target yang dilaksanakan pada SMKKN

**Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

**Drs. A. Palguna Ruteka**  
NIP. 19650924 199303 1 001

Jakarta, 12 Desember 2024  
**Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK**

  
**Dr. H. Kusdamayanti, M.Si.**  
NIP. 19670815 199203 2 002



**REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2024  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp)	Target Menjadi	Satuan	Target Output Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	16.742.405.000	3.659*	Orang	0	235	442	835	1120	1248	2805	3095	3371	3618	3659	3659
	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	130.000.000	2.506*	Orang	53	303	808	969	1177	1523	1709	2049	2217	2466	2466	2506
	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	610.000.000	7.871*	Orang	0	660	960	1280	2551	3911	4900	5921	7071	7591	7871	7871
	Lulusan Pendidikan Karya Siswa	Karya Siswa 52 dan 53 SDM LHK	1.745.850.000	10	Orang	1	2	4	4	5	6	6	7	8	9	9	10
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	Layanan Pengelolaan KHDTK	300.000.000	70	Poin	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70
Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	2.719.934.000	491**	Orang	0	0	0	0	0	491	491	491	491	491	491	491
<b>Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya</b>																	
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP Pusat Diklat SDM LHK	Layanan Umum Layanan BMN	594.000.000	80	Poin	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Diklat SDM LHK		6.000.000	82,5	Poin	-	-	35	45	50	55	60	60	60	75	80	82,5

Catatan : \* Total target termasuk yang dilaksanakan pada Balai Pelatihan LHK

\*\* Total target yang dilaksanakan pada SMKKN

Jakarta, 12 Desember 2024  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK

  
Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si.  
NIP. 19670815 199203 2 002



## **PUSAT DIKLAT SDM LHK**

[www.pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id](http://www.pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id)

Jl. Mayjen Ishak juarsa, Gunung Batu, Bogor

@pusdiklatsdmlhk